

**KONTESTASI POLITIK TATA RUANG INDUSTRIALISASI DI
KABUPATEN NGANJUK**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Politik Pada
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Dengan Peminatan *Governance* dan
Transisi**



Disusun Oleh :

M Amirul Mu'minin

145120500111025

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG**

2018

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan taufiq dan hidayah-Nya sehingga Skripsi yang berjudul “**Kontestasi Politik Tata Ruang Industrialisasi di Kabupaten Nganjuk**” ini dapat terselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan bagi mahasiswa program S1 Ilmu Politik Universitas Brawijaya. Dalam kesempatan ini juga, peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu selama proses penulisan sampai terselesainya skripsi ini. Ucapan terima kasih peneliti haturkan kepada :

1. Allah SWT karena atas berkat dan nikmat sehat yang diberikan sehingga penulis mampu menyelesaikan laporan PKN ini.
2. Kedua Orangtua penulis, Ibu dan Bapak yang selalu memberikan *support*, semangat dan doa yang selalu menyertai penulis. Serta seluruh keluarga besar yang juga selalu memberikan dukungan yang tiada henti-hentinya.
3. Bapak Dr. Sholih Mu’adi, S.H, M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya, Malang.
4. Bapak Dr.Drs. Hilmy Mochtar, MS. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, terimakasih atas masukan dan arahnya selama ini sehingga penulis termotivasi untuk segera menyelesaikan skripsi.
5. Bapak M. Fajar Ramadlan, S.IP., M.IP. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, terimakasih atas bimbingannya selama ini sampai pada tahap akhir pengerjaan skripsi.

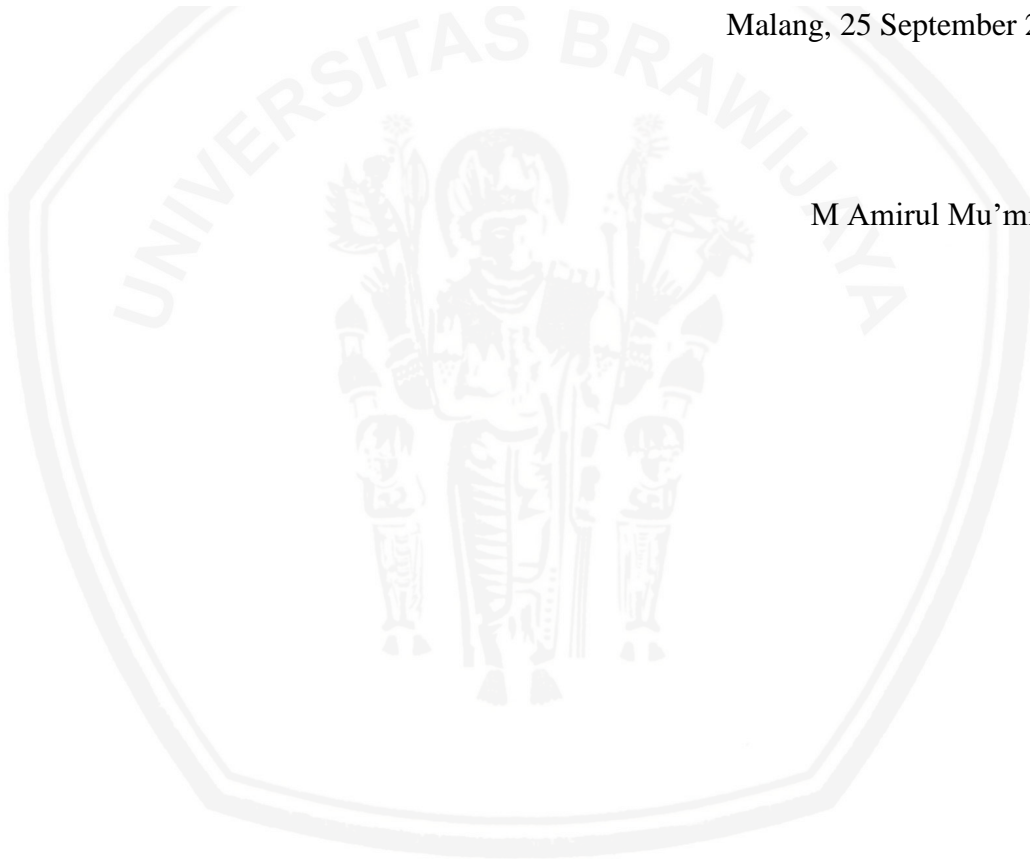
6. Bapak Dr. Abdul Aziz, S.R.,M.Si selaku Dosen Penguji Pertama
7. Bapak Faqih alfian, S.IP.,M.IP selaku Dosen Penguji Kedua
8. Ibu Karimah selaku Kepala Bidang Perekonomian di Badan Perencanaan dan Pembangunan Provinsi Jawa timur.
9. Bapak Drs. Gunawan Widagdo,M.Si selaku Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Kabupaten Nganjuk.
10. Bapak Muji Selaku Kepala Bidang Perencanaan Umum di Bappeda Kabupaten Nnganjuk.
11. Bapak Agus selaku Kepala Bidang Perencanaan di Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk.
12. Bapak Heni .R. selaku Kepala Bidang Perencanaan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk.
13. Bapak Drs. Sudrajat selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk.
14. Teman-teman seperjuangan di bangku kuliah, terkhusus kepada Aries, Chalsye, Grace, Mba yosi, Mba Ipeh, Mas Luqman yang selalu memberikan semangat kepada penulis dan memotivasi untuk segera menyelesaikan skripsi.
15. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan laporan ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Akhir kata, penulis sangat menyadari bahwa akan ditemukan banyak kekurangan dalam penulisan Skripsi ini. Sehingga penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan tersebut. Dengan itu, penulis menerima segala

saran dan kritik yang membangun dalam rangka memberikan perbaikan bagi penulis yang dapat disampaikan melalui email ke amirulmu2007@gmail.com .
Penulis juga berharap semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.
Terima kasih.

Malang, 25 September 2018

M Amirul Mu'minin



ABSTRAK

M. Amirul Mu'minin, Kontestasi Tata Ruang Industrialisasi di Kabupaten Nganjuk. Tim Pembimbing : Dr. Hilmy Mochtar , MS. dan Moch. Fajar Shodiq Ramadhan. S.ip., M.ip.

Permasalahan penataan ruang telah menjadi sebuah dilemma dalam sebuah pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun daerah. Dalam pembuatan kebijakan tata ruang yaitu RTRW, harus sesuai dengan kondisi sebenarnya. Sehingga tidak timbul permasalahan yang akan merugikan dikemudian hari. Yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai penataan ruang di Kabupaten Nganjuk akibat adanya proses industrialisasi. Industri yang berkembang memiliki tatanan yang tidak beraturan bahkan banyak diantaranya yang memakan lahan pertanian produktif yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai lahan pertanian berkelanjutan. Sehingga, jika permasalahan ini tetap dibiarkan, maka akan berdampak pada penurunan produktifitas sektor pertanian itu sendiri. Dari permasalahan diatas, peneliti akan menganalisis menggunakan teori produksi ruang dari Henri Lefebvre dan teori ekonomi politik ruang dari David Harvey.

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya cara pandang yang sama dari para aktor yang terlibat, semua menyatakan setuju dengan adanya industrialisasi yang ada di Kabupaten Nganjuk. kemudian relasi yang terjalin antar aktor dirasa kurang baik dan cenderung lebih dominan di Bappeda dan Dinas Perizinan, kemudian yang terakhir adalah adanya proses spasialisasi ruang, representasi ruang dan ruang representasi.

Kata Kunci: Industrialisasi, Pertanian Berkelanjutan, Produksi Ruang, Ekonomi politik Ruang.

ABSTRACT

M. Amirul Mu'minin , Spatial Contestation of Industrialization in Nganjuk Regency. Supervisor: Dr. Hilmy Mochtar, MS. and Moch. Fajar Shodiq Ramadhan. S.ip., M.ip.

The problem of spatial planning has become a dilemma in a government, both central and regional governments. In making spatial policies, namely the Spatial Plan, must be in accordance with the actual conditions. So there are no problems that will cause harm in the future. The main problem in this research is about spatial planning in Nganjuk Regency due to the industrialization process. The industry that develops has an irregular order, even many of them eat productive agricultural land that has previously been designated as sustainable agricultural land. So, if this problem is left unchecked, it will have an impact on the productivity of the agricultural sector itself. From the problems above, the researcher will analyze using the theory of space production from Henri Lefebvre and the theory of space political economy from David Harvey.

The results of this study indicate that there are similar perspectives from the actors involved, all of them agree with the industrialization in Nganjuk Regency. Then the relationships that exist between actors are perceived to be unfavorable and tend to be more dominant in Bappeda and Dinas Perizinan, then the latter is the process of spatial practice, representation of space and space of representation.

Keywords: Industrialization, Sustainable Agriculture, Production of Space, Political Economy of Space.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING.....	i
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II KERANGKA TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Teori Produksi Ruang Henri Lefebvre.....	8
2.2 Teori Ekonomi Politik Ruang David Harvey.....	13
2.3 Kerangka Konseptual.....	17
2.3.1 Tata ruang.....	17
2.3.2 Industrialisasi.....	18
2.3.3 Sektor Pertanian.....	20
2.3.4 Konversi Lahan.....	22
2.4 Penelitian Terdahulu.....	24
2.5 Kerangka Berfikir.....	27
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	30
3.1 Pendekatan Penelitian.....	30
3.2 Teknik Pengumpulan Data.....	31

3.3 Teknik Penentuan Informan.....	32
3.4 Teknik Analisis Data.....	33
BAB IV GAMBARAN UMUM KABUPATEN NGANJUK.....	36
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Nganjuk.....	36
4.2 Gambaran Umum Sektor Pertanian di Kabupaten Nganjuk.....	38
4.3 Gambaran Umum Sektor Industri di Kabupaten Nganjuk.....	41
BAB V KONTESTASI POLITIK TATA RUANG INDUSTRIALISASI	45
5.1 Dinamika Ruang Kabupaten Nganjuk Pra- Industrialisasi.....	45
5.2 Perspektif Pemerintah Daerah terhadap Industrialisasi di Kabupaten Nganjuk.....	46
a. Perspektif BAPPEDA.....	48
b. Perspektif Dinas Pertanian.....	51
c. Perspektif Dinas Perindustrian dan Perdagangan.....	54
d. Perspektif BAPPEDA Provinsi Jawa Timur.....	55
e. Perspektif Kepala Desa Jekek.....	58
f. Perspektif Masyarakat.....	60
5.3 Analisis Teoritik Kontestasi Ruang Industrialisasi di Kabupaten Nganjuk..	61
a. Analisis Teori Produksi Ruang Henri Lefebvre.....	62
b. Analisis Teori Ekonomi Politik Ruang David Harvey.....	63
5.4 Relasi Aktor dalam Proses Industrialisasi di Kabupaten Nganjuk.....	65
BAB VI PENUTUP.....	69
6.1 Kesimpulan.....	69
6.2 Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA.....	71
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	73

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	25
Tabel 3.1 Daftar Informan.....	32
Tabel 4.1 Luas Wilayah Menurut Jenis Tanah.....	37
Tabel 4.2 Potensi Lahan Kabupaten Nganjuk Tahun 2014.....	39
Tabel 4.3 Lima Komoditas Utama Pertanian di Kabupaten Nganjuk 2014-2016...	40
Tabel 4.4 Data Perusahaan di Kabupaten Nganjuk.....	41
Tabel 4.5 Perkembangan Usaha Industri di Kabupaten Nganjuk 2014-2016.....	44
Tabel 5.1 Tata Guna Lahan Kabupaten Nganjuk.....	45
Tabel 5.2 Cara Pandang aktor dalam melihat perkembangan industri di Kabupaten Nganjuk.....	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Grafik Kontribusi Sektor dalam PDRB Kabupaten Nganjuk.....	1
Gambar 2.1 Triad Konseptualn Henri Lefebvre.....	11
Gambar 2.2 Kerangka Berfikir.....	28
Gambar 3.1 Komponen Analisis Data Milles dan Hubberman.....	34



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Seiring dengan perkembangan zaman disertai dengan pertumbuhan penduduk yang semakin banyak mengakibatkan kebutuhan akan lahan semakin meningkat, banyak lahan yang kemudian dialihfungsikan ke sektor lain seperti dijadikan kawasan industri yang kemudian memicu tumbuhnya kawasan perumahan dan pertokoan disekitarnya¹. Sejatinya pemanfaat ruang yang tepat dan sesuai dengan kaidah keberlanjutan dapat memberikan dampak bagi kehidupan masyarakat yang lebih baik, namun sebaliknya jika pemanfaatan ruang tanpa adanya perencanaan yang baik yaitu dengan lebih mengedepankan aspek kepentingan yang mayoritas datang dari segelintir golongan saja dibanding aspek keberlanjutan (*sustainability*), maka bukan tidak mungkin akan merusak dan menurunkan nilai guna ruang itu sendiri².

Realitas yang terjadi saat ini, sebuah pemanfaatan ruang terutama yang terjadi di kota-kota besar telah dipengaruhi oleh golongan kapital, yang mana mereka secara berkala terus berusaha mendominasi pemanfaatan ruang sebagai sarana produksi dan reproduksi kapital³. Sehingga ruang itu bukan lagi sebagai

¹ Rohani Budi Prihatin. 2015. *Alih Fungsi Lahan di Perkotaan (Studi Kasus: di Bandung dan Yogyakarta)*. Jakarta: P3DI. Hlm.107

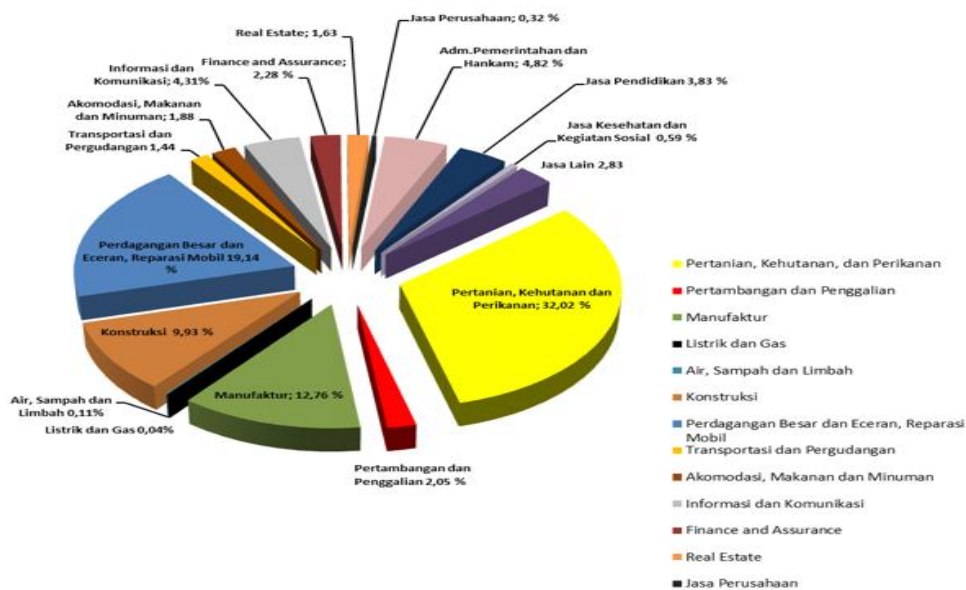
² Penataanruang.com, diakses pada 04 Maret 2017

³ Andrzej Zieleniec. 2007. *Space and Social Theory*. London: Sage Publication. hlm.98

benda yang pasif melainkan sudah menjadi sesuatu yang diperebutkan eksistensinya. Semua pihak yang berkepentingan akan mencari cara untuk bisa mendominasi pemanfaatan ruang. Oleh karena itu dalam sebuah pemanfaatan ruang diperlukan sebuah perencanaan tata ruang yang matang dengan melibatkan berbagai pihak terutama masyarakat secara langsung agar terciptanya keselarasan hasil dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Salah satu daerah yang sedang melakukan *review* terkait peraturan tata ruang adalah Kabupaten Nganjuk. Kabupaten Nganjuk merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang memiliki sumber daya lahan pertanian yang subur dan terkenal sebagai daerah penghasil berbagai produk pertanian dan perkebunan. Hal ini dapat dilihat dari besarnya kontribusi pertanian pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), sebagai berikut:

Gambar 1.1 Grafik Kontribusi Sektor Dalam PDRB Kab. Nganjuk



Sumber: BPS Kabupaten Nganjuk 2016

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa sektor pertanian bersama dengan sektor perkebunan dan kehutanan menduduki posisi pertama sebagai sektor yang paling besar kontribusinya terhadap pemasukan keuangan daerah yaitu sebesar 32,02%, sementara itu pada posisi terakhir ditempati oleh sektor jasa perusahaan dimana kontribusi yang diberikan oleh sektor ini pada tahun 2016 hanya sebesar 0,32% saja. Namun, besarnya kontribusi sektor pertanian selama beberapa tahun belakangan ini terus mengalami penurunan, pada tahun 2012 kontribusi sektor pertanian sebesar 34,36 % turun menjadi 33,63 % pada Tahun 2013 dan terakhir pada Tahun 2016 hanya memberikan kontribusi sebesar 32,02 %⁴.

Berbanding terbalik dengan sektor pertanian yang terus mengalami penurunan, sektor lain yaitu Industri dan jasa terus mengalami pertumbuhan dengan rata-rata 5,01% per tahun⁵. Realitas seperti ini sesuai dengan apa yang dikatakan Fisher bahwa:

“di jaman modernisasi kedudukan sektor pertanian dalam struktur PDRB semakin hari semakin merosot sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, apabila sektor pertanian tumbuh lebih lambat, sedangkan sektor lainnya (industri,jasa, dll.) semakin melaju, maka jelas kedudukan relatif sektor pertanian akan merosot baik dilihat dari segi struktur PDRB maupun kesempatan kerja”⁶.

Menurunnya sektor pertanian di Kabupaten Nganjuk selain karena pengaruh musim yang dalam 2 tahun terakhir belakangan ini, faktor lain yang sangat

⁴ Badan Pusat Statistika Kabupaten Nganjuk. *PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Nganjuk 2012-216 Tahun Dasar 2010*. hlm. 52

⁵ *Ibid.*

⁶ M. Dawam Raharjo.1986. *Transformasi Pertanian, Industrialisasi*.Jakarta: Universitas Indonesia Press. hlm.7

berpengaruh adalah adanya konversi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian termasuk industri⁷. banyak investor yang mulai melirik Kabupaten Nganjuk sebagai sasaran penanaman modal mereka, Selain didukung akses jalan yang mudah, besaran UMK Kabupaten Nganjuk yang masih rendah disinyalir menjadi alasan utamanya. Sejak adanya regulasi resmi mengenai Upah Minimum Kabupaten/kota (UMK) yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 68 Tahun 2015 tentang UMK di Jawa Timur Tahun 2016 tertanggal 20 November 2015 , banyak pabrik-pabrik besar di Jawa Timur memilih untuk melakukan eksodus ke sejumlah kota kecil termasuk Kabupaten Nganjuk, hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menekan biaya produksi karena dengan mereka melakukan eksodus ke kabupaten/kota dengan UMK rendah maka biaya untuk gaji karyawan juga lebih rendah⁸. Seperti yang dikatakan Alferd Weber:

“bahwa Pemilihan lokasi industri didasarkan atas prinsip minimisasi biaya. Lokasi setiap industri tergantung pada total biaya transportasi dan tenaga kerja di mana penjumlahan keduanya harus minimum. Tempat di mana total biaya transportasi dan tenaga kerja yang minimum adalah identik dengan tingkat keuntungan yang maksimum”.⁹

Sehingga bisa dikatakan bahwa dengan kondisi Kabupaten Nganjuk yang luas akan ketersediaan lahan, UMK masih tergolong rendah, tenaga kerja yang sangat banyak serta lokasi yang strategis menjadi pertimbangan para investor untuk melakukan investasi di wilayah Kabupaten Nganjuk.

⁷ Eva nurohmah. 2016. *Lengkong Sasaran Industri*. Kertosono (<https://kertosono.net/lengkong-sasaran-industri/>), diakses pada 05 Maret 2018.

⁸ [http://regional.kompas.com/read/2015/11/21/05000061/Gubernur.Jatim.Tetapkan UMK. 2016](http://regional.kompas.com/read/2015/11/21/05000061/Gubernur.Jatim.Tetapkan%20UMK.2016). diakses pada 10/12/2017.

⁹ David Fearon. 2002. *Alfred Weber, Theory of the Location of Industrie*. UC Santa Barbara: CSISS Classics. hlm.32

Dalam 4 tahun terakhir yaitu tahun 2012-2016 pertumbuhan jumlah industri ini terus mengalami peningkatan baik itu industri formal maupun non formal. Pada tahun 2012 jumlah keseluruhan industri yang ada di Kabupaten Nganjuk adalah 15.999 unit dengan total nilai produksi sebesar Rp. 4.420.689 Milyar. Selanjutnya pada tahun 2013 jumlah industri mengalami peningkatan yaitu sebanyak 16.627 unit, dengan total nilai produksi sebesar Rp. 4.641.721 Milyar. Pada tahun 2015 jumlah total industri sebesar 16.389 unit, dengan total nilai produksi sebesar Rp. 4.859.144 Milyar. Kemudian yang terakhir pada tahun 2016 jumlah total industri sebesar 16.667 unit, dengan total nilai produksi sebesar Rp. 4.894.993 Milyar¹⁰.

Untuk mencegah konversi lahan yang tidak teratur dan terus meluas akibat perkembangan sektor industri di Kabupaten Nganjuk, maka Pemerintah daerah melalui Bappeda serta instansi terkait telah melakukan kajian ulang terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nganjuk tahun 2010-2030 dan penyusunan draft LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) yang bertujuan untuk memproyeksikan lahan mana yang tepat untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan lahan yang tepat untuk kegiatan diluar sektor pertanian salah satunya yaitu industrialisasi. Namun, sampai saat ini baik RTRW maupun LP2B belum selesai dan ditargetkan baru akan selesai pada akhir tahun ini. Sehingga dapat dikatakan bahwa pedoman mengenai pemanfaatan ruang di Kabupaten Nganjuk tidak memiliki kejelasan sampai pada RTRW dan LP2B tersebut selesai dan ditetapkan sebagai peraturan daerah.

¹⁰ Bappeda Kabupaten Nganjuk. *Op.cit.* hlm.23

Melihat *problem* yang telah dijelaskan sebelumnya maka penulis tertarik untuk menganalisis bagaimana kontestasi penataan ruang antara sektor pertanian dan industri yang terjadi di Kabupaten Nganjuk serta bagaimana perspektif aktor yang terkait dalam memahami sebuah ruang, apakah ruang merupakan sesuatu yang harus dilindungi dan dilestarikan atau malah ruang merupakan sebuah objek yang dijadikan sebagai perputaran modal demi memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, rumusan masalah yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perspektif Pemerintah daerah dan masyarakat terhadap industrialisasi di Kabupaten Nganjuk ?
2. Bagaimana kontestasi penataan ruang yang diproyeksikan untuk industrialisasi dan pertanian berkelanjutan di Kabupaten Nganjuk?
3. Bagaimana relasi antar aktor dalam proses industrialisasi di Kabupaten Nganjuk?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk memahami politik tata ruang wilayah di Jawa timur terutama yang berkaitan dengan dilemma industrialisasi.
2. Secara khusus penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis politik tata ruang di Kabupaten Nganjuk yang berkaitan dengan pertumbuhan industri serta faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tata ruang.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah dapat menjadi perspektif baru terhadap kajian politik tata ruang di Indonesia, terutama di era reformasi. Selain itu, penelitian ini akan menambah khazanah penelitian akademik bagi studi ilmu politik, khususnya pada bidang politik tata ruang sehingga dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya, khususnya kepada civitas akademika Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya Malang.



BAB II

KERANGKA TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Produksi Ruang Henri Lefebvre

Pemikiran Lefebvre berawal dari pemahamannya bahwa seluruh aspek kehidupan telah dikuasai oleh golongan kapitalisme, tidak terkecuali ruang. Hal inilah yang membedakan pemikirannya dengan pemikir kiri sebelumnya bahkan oleh Marx sendiri, Jika Marx berbicara mengenai relasi produksi dan akumulasi kapital, maka itu semua menurut lefebvre tidak dapat berjalan tanpa adanya

‘kontribusi ruang.’¹ Hal inilah yang menyebabkan ruang semakin hari semakin langka oleh sebagian golongan terutama masyarakat yang tidak memiliki kapital (miskin), ia mengibaratkan jika zaman dulu orang selalu kekurangan roti, namun tidak pernah kekurangan akan ruang, namun sekarang sebaliknya, ketersediaan gandum sebagai bahan dasar roti sangat berlimpah namun ketersediaan akan ruang semakin berkurang dan langka.²

Realitas yang terjadi saat ini terutama di kota-kota besar, mayoritas ruang yang ada didominasi oleh industri yang dijadikan sebagai lumbung emas oleh golongan kapital, banyak ruang yang seharusnya menjadi ruang publik namun malah diprivatisasi dan alokasikan berdasarkan kelas. Oleh karenanya perlu adanya paradigma baru yang memandang ruang bukan hanya benda pasif melainkan ruang

¹ Stuart Elden. 2007. *There is a Politics of Space because Space is Political Henri Lefebvre and the Production of Space*. Volume 10. Number 2. Hlm 105.

² Ibid.

merupakan arena pertarungan yang didalamnya terdapat perjuangan kelas yang kemudian menghasilkan ruang itu sendiri, sehingga ruang bisa juga dikatakan sebagai produk sosial.³ Selanjutnya ia juga menyebutkan bahwa ruang merupakan produk politik, karenanya ruang merupakan representasi dari kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah yang berkuasa. Sehingga, Praktik tata ruang tidak dapat terlepas dari keberpihakan aktor yang membuat regulasi tata ruang dan kontestasi yang terjadi didalamnya.⁴

Henri Lefebvre telah mengklasifikasikan ruang menjadi 4 (empat) macam yang didasarkan pada sebuah periodisasi ruang⁵, yaitu:

1. Ruang alamiah (*Natural Space*), yaitu merupakan sebuah ruang yang sudah ada dan secara alamiah telah terbentuk. Namun, menurut Lefebvre ruang alamiah ini lama kelamaan akan mengalami kerusakan yang disebabkan oleh masuknya campur tangan manusia yang mempunyai kepentingan melalui proses abstraksi dan pewacanaan ruang.
2. Ruang mutlak (*Absolute Space*), yaitu merupakan ruang yang tercipta secara sendirinya dengan kuasa Tuhan dan bersifat mutlak. Kadang-kadang, ruang ini diartikan sebagai bagian dari alam. Menurut Lefebvre, ruang mutlak ini tidak berlokasi dimana-mana, karena ruang ini menghuni semua tempat dan mempunyai eksistensi simbolik yang tegas. Ruang ini mengimplikasikan keberadaan dari institusi keagamaan, hubungan kosmos dan alam jagad raya.

³ Ibid. hlm 106

⁴ Gregory Bosquet. 2012. *Political Space in the Work of Henri Lefebvre: Ideology and Utopia*. Volume 5. Université Paris Ouest Nanterre. hlm.3

⁵ Kosa Lazarwadi, 2012, *Ruang yang Tercipta oleh Para Pesepeda (Studi Kasus: Bundaran Hotel Indonesia pada acara Car Free Day)*, Depok: Universitas Indonesia.

Dalam bentuknya yang mikro, ruang ini disimbolkan kepada bentuk-bentuk ruang ritual agama, kelahiran maupun kematian.

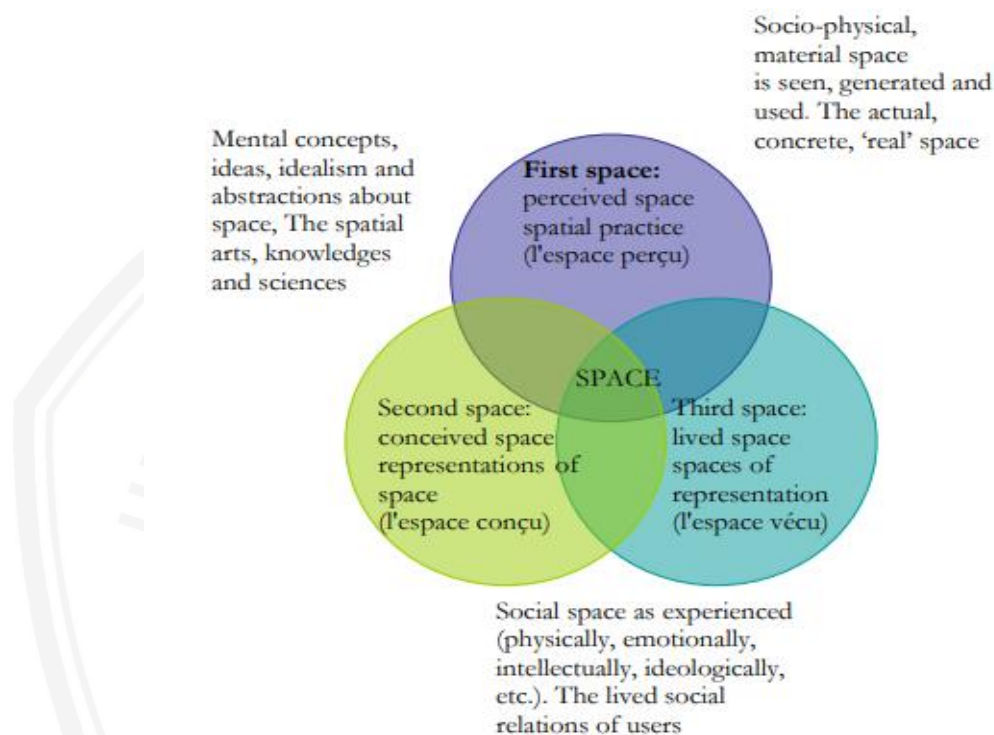
3. Ruang abstrak (*Abstract Space*), disini Lefebvre mengkritisi konsep dari ruang abstrak dari budaya modern kapitalis yang cenderung mereduksi pemahaman dari *perceived*, *conceived* dan *lived space* menjadi sebuah abstraksi yang cenderung homogen. Dalam masyarakat kapitalis, ruang diperlakukan sebagai sebuah komoditas abstrak.
4. Ruang Differensial (*Differential Space*), yaitu merupakan ruang yang lebih tercampur dan lebih bersifat *interpretative*.

Dalam penjelasan lebih lanjut Henri Lefebvre memiliki ketertarikan terhadap apa yang disebut dengan ruang abstrak, dimana ruang abstrak selain bersifat ideasional, ia secara aktual menggantikan ruang historis (yang di dirikan ruang mutlak). Pada dasarnya skala ruang abstrak mempunyai sangkut paut dengan hasrat seseorang untuk menguasai organisasi-organisasi sosial dengan cara menguasai dan memanfaatkan sebuah ruang. Lefebvre menegaskan bahwa ruang abstrak sebagai ruang hegemonik karena menyelimuti dan menggabungkan aspirasi-aspirasi, keinginan, dan impian sehari-hari masyarakat didalam sebuah sistem kapitalisme.

Selanjutnya Lefebvre menjelaskan bahwasanya berbagai perbedaan fenomena perjuangan kelas atau suatu ruang itu terkait dengan suatu daerah, kawasan, wilayah, situs, tanah dan lain sebagainya yang bisa dikatakan bahwa ini merupakan proses spasialisasi ruang. Pada intinya, proses spasialisasi merupakan perpaduan dari tiga unsur penjabaran gagasannya mengenai pendekatan trikotomis

dalam melihat produksi ruang. Levebvre menjelaskan bahwa ada 3 Triad konseptual ruang yang diperlukan dalam produksi ruang, yaitu:

Gambar 2.1 Triad Konseptual Lefebvre



(sumber: <https://research.ncl.ac.uk/forum>)

1. Praktik Spasial (*Spatial Practice Perceived*).

Menurut Levebvre “*Spatial practices refer to the physical and material flow (of individuals, groups or commodities) circulations, transefers and interactions that occur in and across space, stuctured in such a way as to assure social life is produced and reproduced*”⁶. Dalam praktik spatial, ruang dikategorisasikan

⁶ Andrzej Zieleniec.. 2007. *Space and Social Theory*. London: Sage Publication. hlm.74

berdasarkan kegunaannya seperti perumahan, persawahan, lokasi industri, rekreasi dan lain sebagainya yang kemudian oleh pemerintah dijadikan dasar dalam pembuatan kebijakan penataan ruang.

2. Representasi Ruang (*Representations of Space*)

Menurut Lefebvre “*Representations of space is tied to the relations of production and to the ‘order’ which those relations impose, and hence to knowledge, to signs, to codes, and to ‘frontal’ relations*”⁷. Representasi Ruang, dalam konteks ini, berfungsi sebagai penata dari berbagai relasi yang menghubungkan ruang-ruang tertentu dengan berbagai wacana di luar ruang itu sendiri. Representasi inilah yang memberikan jalan bagi manusia untuk membingkai ruang pada konteksnya, dan kemudian memaknainya melalui sistem tanda, kode dan bahasa. Pemaknaan ini diperlukan agar ilmu pengetahuan tentang ruang dapat dikembangkan, dan dengan demikian manusia dapat menempatkan dirinya sebagai pengendali dari berbagai relasi antar-ruang yang terjadi. Manusia membutuhkan ilmu pengetahuan tentang ruang agar dapat memproyeksikan dirinya dan orang lain dalam sebuah ruang.

3. Ruang Representasi (*Space of Representation*)

Menurut Lefebvre “*Space of representations is space as directly lived through its associations and images and symbols, and hence the space of inhabitants and users, but also some artists and perhaps of those, such as a few writers and philosophers, who describe and aspire to do no more than describe*”⁸. Ruang representasi

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.* hlm.75

terbentuk karena adanya sebuah harapan, keinginan dan mimpi terhadap ruang yang dihasilkan dari proses interaksi sosial dan budaya.

2.2 Teori Ekonomi Politik Ruang: David Harvey

David Harvey merupakan ilmuwan lain yang memasukkan ruang sebagai dasar dalam pemikirannya, hal tersebut terlihat dalam karyanya yang berjudul "*The Political Economy of space*". Ia mengatakan bahwa ruang menjadi elemen yang fundamental dalam keberlangsungan hidup kapitalisme sampai saat ini. Namun, pemahaman Harvey ini sedikit berbeda dari apa yang disampaikan oleh Lefebvre sebelumnya, meskipun keduanya sama-sama memandang produksi ruang sangat penting bagi keberlangsungan kapitalisme, Harvey tidak memprioritaskan perkotaan sebagai kebutuhan modal industri.⁹ yang menjadi penting adalah bagaimana sebisa mungkin meminimalisir biaya produksi, namun bisa memaksimalkan kebutuhan akan tenaga kerja, akses ke pasar dan bahan baku.¹⁰

Analisis Harvey mengenai produksi ruang menekankan pada logika investasi kapital yang menjadi kunci utama terbentuknya sebuah kota industri. spasialisasi harvey yang mengadopsi pemikiran dari Marx berusaha menjelaskan bagaimana kebutuhan dan prioritas akumulasi modal memiliki konsekuensi dalam penciptaan infrastruktur fisik di perkotaan serta daerah-daerah yang secara langsung terhubung melalui infrastruktur tersebut. Hal inilah yang kemudian oleh harvey dikatakan sebagai proses yang mengarah pada penciptaan ekonomi ruang.¹¹

⁹ Andrzej Zieleniec. *Op.cit.*, hlm.102

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

Untuk lebih memahami bagaimana harvey menjelaskan mengenai proses penciptaan ekonomi ruang, maka perlu mengetahui bagaimana ia menggunakan teori akumulasi dari Marx. Harvey, seperti Marx dan Lefebvre, memandang bahwa keberlangsungan kapitalisme tergantung pada konsentrasi dan sirkulasi surplus. Kota adalah produk dari proses-proses di mana bentuk dan pengaturan ruangnya memprioritaskan peran yang dimainkan oleh kapital dalam proses akumulasi dan sirkulasi nilai lebih. Lingkungan kota yang tercipta di bawah kapitalisme adalah produk dari kebutuhan akumulasi modal dan konfrontasinya dengan tenaga kerja. Harvey memperjelas bahwa pemikirannya tersebut didasarkan pada analisis teori akumulasi Marx :

“ Within the framework of capitalism, I hang my interpretation of the urban process on the twin themes of accumulation and class struggle. The two themes are integral to each other and have to be regarded as different sides of the same coin different windows from which to view the totality of capitalist activity The class character of capitalist society means the domination of labour by capital.... The essential Marxian insight, however, is that profit arises out of the donunation of labour by capital and that the capitalists as a class must. if they are to reproduce themselves. continuously expand the basis for profit e thus arrive at a conception of a society founded on the principle of "accumulation for accumulations sake, production for productions sake".¹²

Jadi, Dalam kerangka kapitalisme, harvey menggantungkan penafsirannya tentang proses penciptaan kota pada 2 elemen dasar yaitu akumulasi modal dan perjuangan kelas. Dua elemen tersebut merupakan bagian yang harus dianggap sebagai sisi yang berbeda untuk melihat karakter golongan kapitalis dalam dominasi tenaga kerja dengan modal. Pencarian untung-rugi antara komando dan

¹² Ibid. hlm.103

penciptaan lokasi yang menguntungkan, ditambah dengan adaptasi dalam kondisi produksi sosio-teknis, menjadi kekuatan pemindahan yang jauh lebih terlihat dalam proses perkotaan.

Selanjutnya untuk mengetahui proses akumulasi modal dari kapitalis, harvey mengelompokkan 3 sirkuit. Sirkuit kapital yang di maksud oleh Harvey adalah sebagai berikut¹³:

1. Sirkuit primer adalah semua sarana yang dengannya kapitalis berusaha menangkap dan mengekstrak nilai lebih (ranah produksi dan konsumsi langsung). Sirkuit ini terletak di pusat kota, seperti pusat perbelanjaan.
2. Sirkuit sekunder sebagai ranah pembentukan kapital dan konsumsi tetap. Sirkuit ini menjadi tempat produksi barang-barang yang berfungsi sebagai kerangka fisik untuk produksi komoditas yang bertindak sebagai kerangka fisik untuk konsumsi. Pada sirkuit ini identik dengan pabrik-pabrik, perumahan dll.
3. Sirkuit tersier yaitu merupakan sarana pengembangan dan riset. Seperti sekolah, laboratorium dll.

Lebih lanjut dijelaskan oleh Harvey bahwa dalam sirkuit sekunder arus kapital terbagi menjadi dua, yaitu: kapital tetap untuk produksi (pabrik dan perlengkapan, kapasitas penghasil listrik, jaringan rel kereta api, pelabuhan dan lain sebagainya) dan penciptaan suatu dana konsumsi (misalnya, perumahan). Porsi tertentu dari kapital dalam sirkuit sekunder ditanamkan dalam bentuk tanah yang

¹³ Ibid. hlm.104

kemudian menjadi aset-aset bank yang menempati suatu wilayah yang dibangun untuk produksi dan konsumsi (kawasan industri, pelabuhan, bandara, jaringan transportasi dan komunikasi untuk sistem pembuangan limbah dan air, perumahan, rumah sakit, sekolah). Investasi tersebut bisa menyerap sejumlah besar kapital dan tenaga kerja, terutama ketika terjadi ekspansi geografis.

Oleh karena itu, untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk dari penguasaan ruang oleh kaum kapital, menurut Harvey pemerintah harus bisa menjembatani antara kepentingan masyarakat dan juga kaum kapital dalam sebuah pemanfaatan ruang¹⁴. Sikap pemerintah yang tidak netral atau dengan kata lain berpihak kepada kapitalis merupakan suatu kebutuhan dari pemerintah untuk merangkul kapitalis, selain kapitalis yang tentunya membutuhkan pemerintah sebagai pendukung apa yang mereka inginkan khususnya dalam memanfaatkan ruang, disisi lain pemerintah juga tidak bisa lepas dari kaum kapitalis. Karena, kaum kapital akan memberikan keuntungan yang besar pula kepada pemerintah, seperti melalui pajak bangunan, pajak hasil usaha dan lain-lain. Hal ini terkait dengan pernyataan Harvey bahwa keterbelakangan suatu daerah atau kawasan perkotaan disebabkan oleh tidak adanya aliran investasi dari kaum kapital yang berfungsi memproduksi keuntungan, distribusi aliran kapital, dan mengkonsumsi ruang.

¹⁴ Siti Aminah, 2015, Konflik dan Kontestasi Penataan Ruang Kota Surabaya, Masyarakat: Jurnal Sosiologi, 20 (1): hlm.64

2.3 Kerangka Konseptual

2.3.1 Tata Ruang

Tata ruang merupakan wujud struktur ruang dan pola ruang¹⁵. Tujuan penataan ruang wilayah adalah untuk mewujudkan ruang yang memberikan manfaat sesuai dengan potensi yang ada. Struktur ruang sendiri merupakan kumpulan pusat-pusat permukiman, jaringan sarana dan prasarana yang mendukung proses sosial ekonomi masyarakat. Sedangkan pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi ruang sebagai fungsi lindung dan ruang sebagai fungsi budidaya (permukiman, industri, pertanian, pertokoan, dll.). Di dalam tata ruang terdapat suatu distribusi dari tindakan manusia dan kegiatan-kegiatannya untuk mencapai tujuan sebagaimana dirumuskan sebelumnya¹⁶.

Untuk mewujudkan sebuah pengembangan ruang yang sesuai dengan potensi masing-masing ruang, supaya tidak terjadi pemanfaatan ruang yang justru mengurangi nilai dari ruang itu sendiri, maka digunakan 3 (tiga) upaya penataan ruang, diantaranya adalah:

1. Proses perencanaan tata ruang wilayah, dimana dalam proses ini akan menghasilkan rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang nantinya akan dijadikan sebagai landasan dalam sebuah pemanfaatan ruang. Selain itu RTRW pada dasarnya merupakan bentuk intervensi yang dilakukan agar interaksi yang

¹⁵ Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk. Bappeda. Nganjuk., 2011, hlm. I-12

¹⁶ EM Lukman Hakim. 2011. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. hlm. 68

terjalin antara manusia/makhluk hidup dengan lingkungannya dapat berjalan serasi, selaras dan seimbang.

2. Proses pemanfaatan ruang, yaitu merupakan wujud operasional dari rencana tata ruang atau pelaksanaan pembangunan itu sendiri.
3. Proses pengendalian pemanfaatan ruang yang terdiri atas mekanisme perizinan dan penerbitan terhadap pelaksanaan pembangunan agar tetap sesuai dengan apa yang telah diatur dan ditetapkan dalam RTRW.

2.3.2 Industrialisasi

Industrialisasi merupakan salah satu skema yang dilakukan pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi¹⁷. Dalam sebuah proses industrialisasi pastinya akan menimbulkan banyak sekali dampak, baik itu untuk masyarakat sendiri maupun pemerintah. Bagi masyarakat sendiri industrialisasi memberikan dampak positif yaitu mengurangi angka pengangguran karena industrialisasi membuka banyak sekali kesempatan kerja, namun selain dampak positif, industrialisasi juga menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat seperti pencemaran lingkungan akibat limbah produksi dsb. Sedangkan untuk pemerintah, industrialisasi mampu memberikan penghasilan daerah yang lebih banyak terutama dari pajak bangunan dan pajak penghasilan. Akan tetapi industrialisasi juga menimbulkan dampak negatif bagi pemerintah seperti masalah limbah yang selalu menjadi momok dalam setiap proses industrialisasi, belum lagi masalah ledakan jumlah penduduk akibat urbanisasi selain itu penyempitan lahan juga menjadi ancaman yang sangat serius

¹⁷ Andrew Heywood, 2014, *Politik: Edisi Keempat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm.266

bagi pemerintah dalam memproyeksikan lahan mana yang benar-benar tepat dan sesuai untuk sentra industri.

Industrialisasi sekarang ini dianggap lebih menjanjikan dibanding sektor lainnya seperti pertanian. Akan tetapi industrialisasi memicu perubahan sosial menuju masyarakat yang lebih modern, dimana melalui industrialisasi peranan teknologi menjadi semakin penting untuk diterapkan dalam proses produksi. Akibatnya hubungan yang terjalin antar manusia (*human relations*) menjadi berubah, demikian juga struktur sosial masyarakat di sekitarnya. Industrialisasi yang semula sebagai sebuah sistem yang diterapkan dalam usaha-usaha produksi pabrik, kemudian memengaruhi komunitas secara keseluruhan. Pada saat teknologi dimanfaatkan untuk melakukan produksi massal, maka industrialisasi menjadi faktor penggerak utama (*prime mover*) terjadinya perubahan sosial¹⁸.

Dalam suatu daerah yang siap untuk menerapkan industrialisasi maka daerah tersebut juga harus siap menerima resiko terburuk dari adanya proses industrialisasi. Seperti permasalahan limbah dan dampak negatif lainnya yang sudah di jelaskan di paragraf sebelumnya. Ada banyak sekali faktor yang menyebabkan suatu daerah mengalami proses industrialisasi dan mendorong para pengusaha untuk melakukan investasi di daerah tersebut, diantaranya sumber daya alam maupun manusia yang sangat melimpah serta daerah tersebut terjaungkau aksesibilitasnya dan dekat dengan pasar karena hal tersebut dapat menekan biaya produksi dan memberikan keuntungan besar bagi si pengusaha itu sendiri.

¹⁸ Augusta I. 2001, *Modul kuliah sosiologi industri*, Bogor: IPB. hlm. 17

Alferd Weber Alfred Weber, seorang ahli ekonomi Jerman menulis buku berjudul *Uber den Standort der Industries* pada tahun 1909. Weber mendasarkan teorinya bahwa pemilihan lokasi industri didasarkan atas prinsip minimisasi biaya¹⁹. Weber menyatakan bahwa lokasi setiap industri tergantung pada total biaya transportasi dan tenaga kerja di mana penjumlahan keduanya harus minimum. Tempat di mana total biaya transportasi dan tenaga kerja yang minimum adalah identik dengan tingkat keuntungan yang maksimum. Uraian tentang teori Weber ini mengikuti uraian yang terdapat dalam buku John Glasson. Dalam perumusan modelnya, Weber bertitik tolak pada asumsi berikut.

1. Unit telaahan adalah suatu wilayah yang terisolasi, iklim yang homogen, konsumen terkonsentrasi pada beberapa pusat, dan kondisi pasar adalah persaingan sempurna.
2. Beberapa sumber daya alam seperti air, pasir, dan batu bata tersedia di mana-mana (ubiquitous) dalam jumlah yang memadai.
3. Material lainnya seperti bahan bakar mineral dan tambang tersedia secara sporadis dan hanya terjangkau pada beberapa tempat terbatas.
4. Tenaga kerja tidak ubiquitous (tidak menyebar secara merata) tetapi berkelompok pada beberapa lokasi dan dengan mobilitas yang terbatas.

2.3.3 Sektor Agraris (Pertanian)

Sektor pertanian merupakan sektor yang paling banyak memberikan harapan hidup bagi masyarakat, terutama masyarakat pedesaan yang menggantungkan

¹⁹ Raharjo Adisasmita. 2014. *Ekonomi Tata Ruang Wilayah*. Yogyakarta: Graha Ilmu. hlm.46

sumber mata pencahariannya dengan cara bertani. Di Indonesia sendiri sebagai negara agraris mempunyai berbagai komoditas pertanian yang sangat beranekaragam seperti padi, jagung, kedelai, bawang merah, dll. Namun yang patut disayangkan adalah masih banyak sekali produk-produk pertanian impor yang masuk ke negara kita, hal ini tentunya memberikan dampak buruk terhadap pertanian dalam negeri, karena banyak konsumen yang berfikir bahwa produk impor lebih berkualitas daripada produk dalam negeri.

Selain itu masalah lain yang dapat mengancam keberlangsungan dari sektor pertanian di Indonesia adalah semakin hari lahan pertanian semakin berkurang karena di alih fungsikan untuk kepentingan diluar sektor pertanian, seperti misalnya industrialisasi, pembangunan infrastruktur, perumahan, pertokoan, dsb. Jika hal ini terus dibiarkan maka bukan tidak mungkin sektor pertanian di negara kita akan mencapai pada titik terendah.

Untuk mengatasi itu semua tentunya diperlukan berbagai upaya khusus dari pemerintah untuk tetap menjaga keberlangsungan sektor pertanian yang sudah mulai dianggap kurang menguntungkan dibandingkan dengan sektor lainnya terutama industrialisasi. Karena sejatinya, sektor pertanian selama ini telah memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pertumbuhan dan pembangunan nasional. adapun kontribusi tersebut antara lain²⁰:

²⁰ Tambunan, Tulus T.H. 2003. *Perkembangan Sektor Pertanian di Indonesia, Beberapa Isu Penting*. Jakarta: Ghalia Indonesia. hlm.9

1. Kontribusi produk, dimana sektor pertanian telah berkontribusi terhadap penyedia makanan dan bahan baku untuk kegiatan produksi pada sektor nonpertanian terutama industri pengolahan seperti industri-industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian jadi, barang-barang dari kulit dan farmasi.
2. Kontribusi pasar, yaitu sektor pertanian pada tahap-tahap awal pembangunan memiliki populasi yang besar yang membentuk permintaan domestik terhadap produk-produk dari industri dan sektor-sektor lain dalam negeri.
3. Kontribusi faktor-faktor produksi, dimana sektor pertanian merupakan sumber modal untuk investasi di dalam ekonomi karena mampu memberikan tenaga kerja untuk sektor nonpertanian dan masih memiliki sumbangan output yang penting terhadap pembentukan produk domestik bruto (PDB), meskipun realitanya saat ini semakin hari sumbangsih sektor pertanian pada PDB terus mengalami penurunan seiring dengan pembangunan ekonomi yang menurunkan eksistensi dari sektor pertanian sendiri.
4. Kontribusi devisa, yaitu sektor pertanian telah mampu memberikan pemasukan sumber devisa negara yang cukup besar, baik itu melalui ekspor penjualan produk-produk pertanian maupun peningkatan produksi komoditas pertanian yang telah menggantikan impor (substitusi impor).

2.3.4 Konversi lahan (*Land use conversion*)

Konversi Lahan yang terus terjadi saat ini telah mengakibatkan ketersediaan lahan terutama lahan pertanian terus mengalami penurunan²¹. Laju konversi lahan

²¹ Zaenal mustofa. 2011. *Analisis faktor yang memengaruhi alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Demak*. Skripsi. UNDIP Semarang. hlm 23

saat ini diperkirakan mencapai 100 *hektare* pertahun dengan prosentase tertinggi terjadi di kepulauan Jawa²². Secara umum konversi lahan memiliki kecenderungan terjadi diatas lahan pertanian dengan tingkat produktivitas yang tinggi dengan saluran irigasi yang baik, adapun faktor yang mengakibatkan hal tersebut terjadi adalah:

1. Ketersediaan Infrastruktur pendukung perekonomian yang memadai. Ketersediaan infrastruktur terutama akses jalan yang memadai umumnya berada pada area lahan yang produktif sehingga para investor lebih memelih lahan produktif untuk dijadikan investasi (industri, perumahan, perhotelan, dll.) yang tentunya akan lebih mempermudah dalam memperoleh keuntungan.
2. Dasar Hukum tentang perlindungan lahan masih sangat lemah. Realitas seperti ini terjadi karena para pelaku pembuat kebijakan beranggapan bahwa lahan pertanian hanya bisa menghasilkan komoditas pertanian saja, sedangkan komoditas pertanian sendiri dianggap memiliki nilai jual yang sangat rendah sehingga kurang bisa memberikan kontribusi lebih terhadap pendapatan daerah yang dapat dilihat melalui GDP (*gross domestic product*)²³. Salah satu dasar hukum konversi lahan yang ada di negara kita adalah Undang-undang No 41 tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, yang mengatakan bahwa Indonesia sebagai negara agraris perlu menjamin penyediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan sebagai sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dengan mengedepankan prinsip

²² Prof. Dr. Soemarno. 2013. *Konversi lahan*. PPSUB. Hlm.18

²³ Ibid. hlm.19

kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional serta bahwa makin meningkatnya pertumbuhan penduduk serta perkembangan ekonomi dan industri mengakibatkan terjadinya degradasi, alih fungsi, dan fragmentasi lahan pertanian pangan telah mengancam daya dukung wilayah secara nasional dalam menjagam kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan²⁴.

Selain faktor diatas banyak sekali faktor lain yang mengakibatkan konversi lahan pertanian menjadi non pertanian, karena seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk tentu diikuti pula dengan meningkatnya angka kebutuhan akan lahan seperti kebutuhan untuk membangun rumah, membangun lapangan usaha dll. Pada dasarnya proses konversi lahan bermula dari penjualan lahan kemudian uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk kegiatan non produktif seperti renovasi rumah dan membeli kendaraan, sehingga dalam jangka panjang ketersediaan lahan akan terus berkurang. Untuk itu Pemerintah harus bersikap bijak dan jangan menganggap mudah masalah konversi lahan.

2.4 Penelitian Terdahulu

Dalam memperdalam pemahaman konsep mengenai teori tata ruang disertai dengan studi kasus di beberapa wilayah lain, maka penulis menggunakan beberapa referensi dari penelitian terdahulu, antara lain:

²⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Perbedaan Penelitian	Hasil Penelitian
Fuzha Faradhitas .S.	Politik Tata Ruang: Studi Tentang Kontestasi Wilayah Bantaran Sungai Kumuh Jodipan, Kota Malang	Skripsi (2017)	<ul style="list-style-type: none"> Fokus penelitian pada perubahan pola tata ruang di perkampungan kumuh sekitar bantaran sungai brantas menuju kampung wisata. 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya perbedaan pemandangan antara pemerintah dan masyarakat terkait ruang disekitar bantaran sungai. Adanya peralihan fungsi ruang mutlak menjadi ruang abstrak.
Kurniawan Akbar	Implementasi Kebijakan Tata Ruang tentang Kawasan Pendidikan Tinggi Terpadu di Kota Makassar	Skripsi (2015)	<ul style="list-style-type: none"> Berfokus pada bagaimana Implementasi Kebijakan Tata ruangnya. Teori yang digunakan adalah teori tinjauan tentang kota dan tinjauan tentang rencana tata ruang wilayah 	<p>Adanya masalah yang kursial dan mendasar, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kurangnya kapasitas Implementator. Kurang adanya koordinasi yang baik antara pemerintah dan pihak swasta. Kurang adanya pengawasan yang menyeluruh. Hal tersebut terjadi karena ketidak adaan peraturan perencananaan tata ruang yang pasti.
Siti Aminah	Konflik dan Kontestasi Penataan Ruang Kota Surabaya	Jurnal Ilmiah (2015)	<ul style="list-style-type: none"> Berfokus pada konflik dan kontestasi penataan ruang secara ilmu sosiologi. 	<ul style="list-style-type: none"> Kerangka penataan ruang yang menggunakan Perda RTRW No. 3 Tahun 2007 telah menimbulkan dampak yang berujung pada penguatan dan keberpihakan pemerintah kota

				<p>kepada pihak kapitalis/investor.</p> <ul style="list-style-type: none"> •Penguasaan ruang di Kota Surabaya mengikuti aliran sirkuit kapital yang ada (primer, sekunder, dan tersier)
--	--	--	--	--

Dalam penelitian terdahulu yang pertama oleh Fauzha Faradhitas .S. yang berjudul “Politik Tata Ruang: Studi Tentang Kontestasi Wilayah Bantaran Sungai Kumuh Jodipan, Kota Malang” mempunyai fokus permasalahan tentang perbedaan perspektif antara masyarakat dan pemerintah daerah Kota Malang dalam melihat praktek penggunaan ruang di sekitar bantaran sungai yang saat ini menjadi sebuah perkamupungan berbasis wisata. Dulunya kawasan permukiman disekitar bantaran sungai sebelum menjadi perkampungan wisata adalah merupakan ruang terbuka hijau yang selanjutnya beralih fungsi menjadi perkampungan warga yang sangat kumuh. Perbedaan mendasar antara penelitian terdahulu yang pertama dengan penelitian ini adalah lingkup penelitian dalam penelitian ini lebih luas yaitu menyangkut area kabupaten, sedangkan dalam penelitian ini hanya wilayah sekitar bantaran sungai brantas.

Selanjutnya penelitian terdahulu kedua oleh Kurniawan Akbar yang berjudul “Implementasi Kebijakan Tata Ruang tentang Kawasan Pendidikan Tinggi Terpadu di Kota Makassar”. Hal yang membedakan penelitian terdahulu ke dua dengan penelitian ini adalah *Pertama*, Teori yang digunakan berbeda, pada penelitian terdahulu menggunakan teori tinjauan tentang kota dan tinjauan tentang rencana tata ruang wilayah sedangkan dalam penelitian ini menggunakan teori produksi

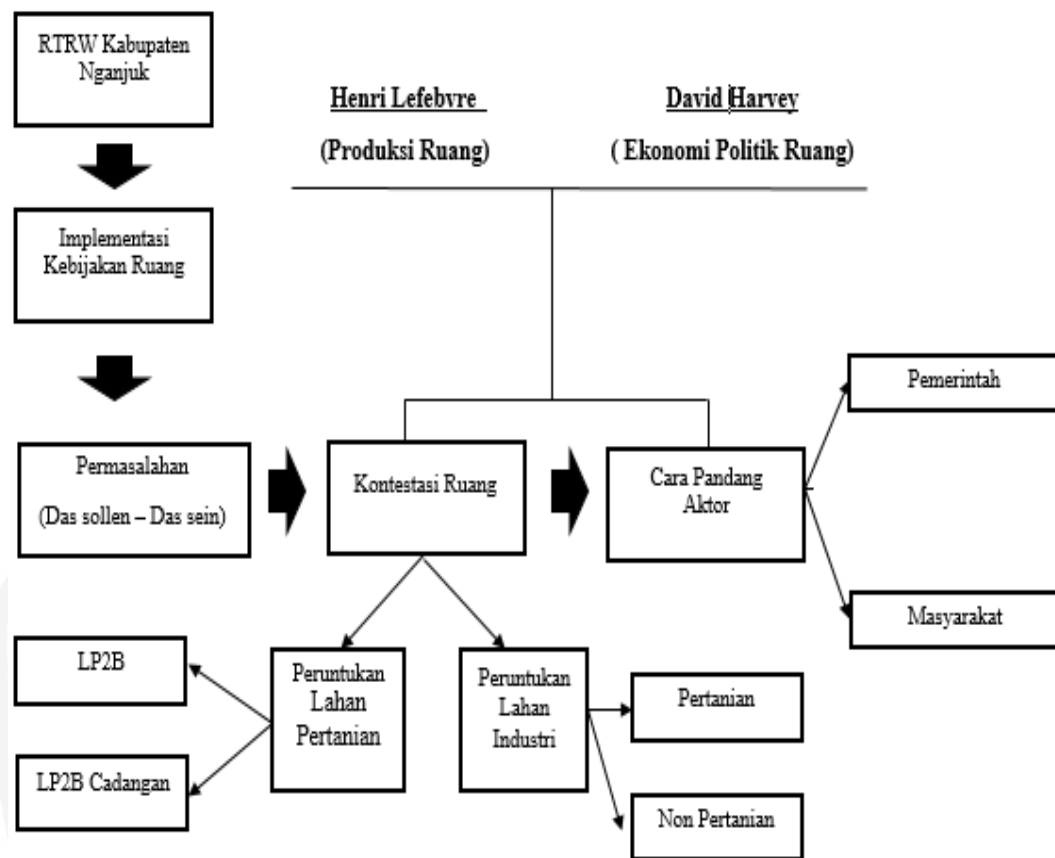
ruang dari Henri Lefebvre dan David Harvey. *Kedua*, Fokus penelitian dalam penelitian terdahulu hanya terkait dengan implementasi kebijakan tata ruang sedangkan dalam penelitian ini penulis ingin menganalisis bukan hanya dari sudut pandang implementasi kebijakan tata ruang akan tetapi juga kontestasi yang terjadi didalamnya serta perspektif aktor dalam memahami apa itu ruang.

Yang terakhir adalah penelitian terdahulu oleh Siti Aminah yang berjudul “Konflik dan Kontestasi Ruang Kota Surabaya”. Penelitian ini sama-sama menggunakan teori Produksi ruang Henri Lefebvre dan David Harvey, tetapi perbedaannya adalah *Pertama*, Lokasi yang diteliti dalam penelitian terdahulu merupakan perkotaan modern dimana pengaruh kapital sangat kuat dan Kontestasi yang terjadi menyangkut banyak hal, sedangkan Kabupaten Nganjuk masih merupakan Kabupaten yang baru akan memulai untuk berproses menjadi kota industri. *Kedua*, dalam penelitian terdahulu lebih menekankan analisis secara Sosiologis sedangkan dalam penelitian ini lebih bersifat politis.

2.5 Kerangka Berfikir

Sebagai acuan dalam melaksanakan penelitian maka disini peneliti mencoba untuk membuat sebuah kerangka berfikir. Selain itu kerangka berfikir juga mempermudah peneliti saat menyusun laporan hasil penelitian. Adapun kerangka berfikir tersebut adalah sebagai berikut :

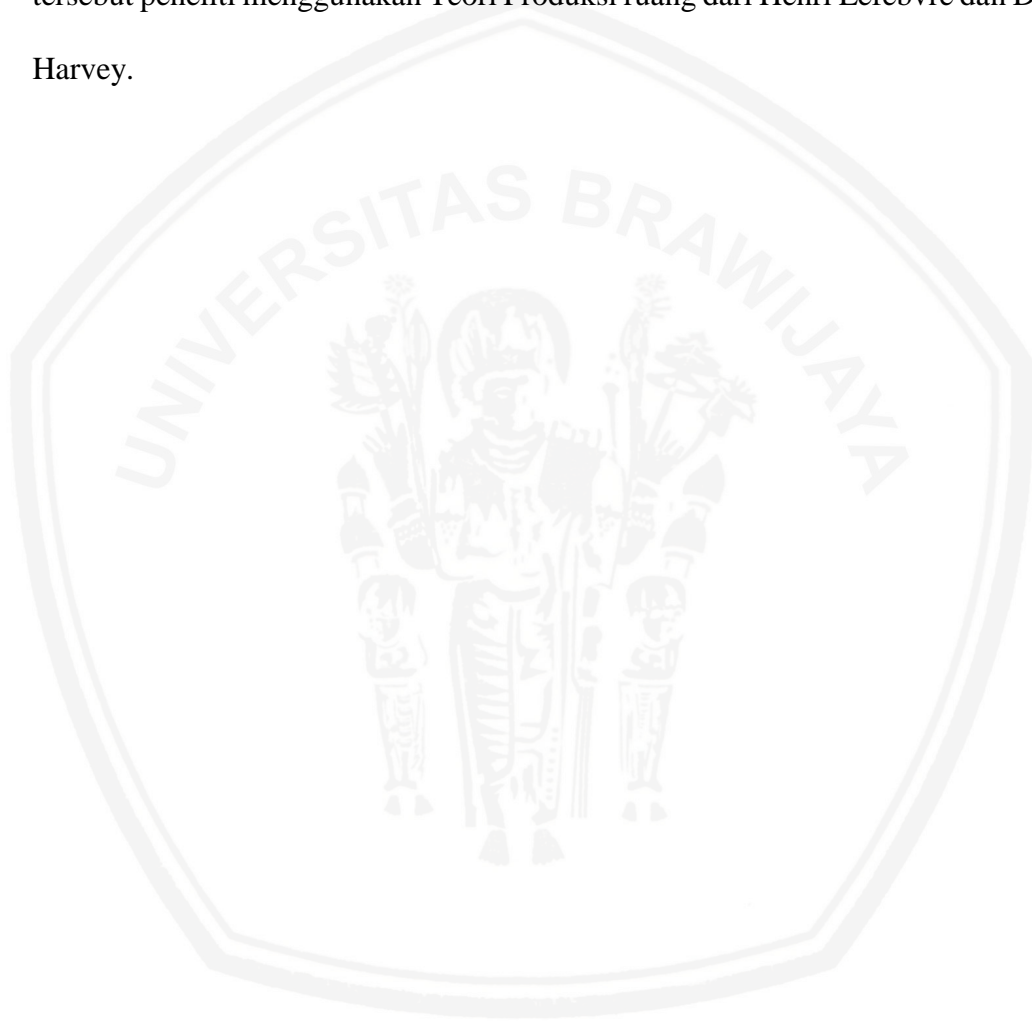
Gambar 2.2 Kerangka berfikir



(Sumber: diolah oleh penulis, 2018)

Dapat dilihat dari Gambar 2.1 Kerangka berfikir bahwa alur dari penelitian ini berawal dari implementasi kebijakan tata ruang di Kabupaten Nganjuk tidak sesuai dengan apa yang tertulis dalam RTRW tahun 2010-2030, terdapat banyak sekali penyimpangan yang terjadi terutama terkait dengan konversi lahan pertanian. Terdapat beberapa wilayah yang seharusnya menjadi pengembangan sektor pertanian namun faktanya ditemukan pabrik yang berdiri diatas lahan pertanian produktif dan tidak ada kaitannya sama sekali dengan potensi pertanian di daerah tersebut. Tentu saja hal ini menjadi sebuah *problem* baik untuk pemerintah maupun masyarakat di Kabupaten Nganjuk.

Hal ini tentunya terkait dengan bagaimana para aktor yang terlibat yaitu Pemerintah, masyarakat dan investor dalam memahami keberadaan sebuah ruang. Bagaimanapun konversi lahan tidak akan bisa dibendung apabila para aktor yang terlibat bersifat kapitalis. Untuk itu untuk mengetahui lebih dalam permasalahan tersebut peneliti menggunakan Teori Produksi ruang dari Henri Lefebvre dan David Harvey.





BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian dengan judul “Politik Tata Ruang Industrialisasi di Kabupaten Nganjuk” ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian Kualitatif mencoba menjelaskan permasalahan secara deskriptif dan mendalam yang akan menghasilkan data lisan maupun tertulis dari informan yang sudah di amati. menurut Lareau dan Shultz dalam David Marsh dan Gerry Stoker¹:

“Metode kualitatif adalah istilah untuk menjelaskan mengenai berbagai macam teknik seperti observasi, observasi partisipan, wawancara individu intensif, dan wawancara kelompok fokus, yang berusaha memahami pengalaman dan praktik informan kunci untuk menempatkan mereka secara tepat dan dalam konteks”

Dalam sebuah penelitian yang bersifat kualitatif menggunakan cara penggabungan (triangulasi) dan analisis data yang bersifat induktif, kemudian hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Selanjutnya dalam penelitian kualitatif akan ada tiga kemungkinan terhadap sebuah permasalahan yang dibawa oleh peneliti dalam penelitian². *Pertama*, masalah yang

¹ David Marsh, Gerry Stoker. 2012. *Teori dan Metode dalam Ilmu Politik*. Nusa Media. hlm. 239

² Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. hlm.205

dibawa peneliti bersifat tetap, sehingga sejak awal sampai akhir penelitian menggunakan judul proposal dan judul laporan penelitian yang sama. *Kedua*, masalah yang dibawa peneliti setelah memasuki penelitian berkembang dan meluas namun tidak terlalu banyak perubahan sehingga judul penelitian cukup disempurnakan. *Ketiga*, masalah yang dibawa peneliti setelah turun langsung ke lapangan mengalami perubahan total, sehingga harus mencari masalah yang baru. Masalah ini biasanya terjadi ketika peneliti tidak mendapatkan akses untuk melakukan penelitian, selain itu permasalahan sudah menemukan titik terang dll.

Maka dari itu penelitian kali ini akan menggunakan jenis dan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Metode ini digunakan agar permasalahan dapat digambarkan dengan jelas dan terperinci mengenai rencanana tata ruang wilayah Kabupaten Nganjuk dan dilemma industrialisasi di tingkat lokal.

3.2 Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa *interview* atau wawancara dan penelusuran dokumen, berikut adalah penjelasannya:

1. *Interview* atau Wawancara³

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara berinteraksi langsung kepada informan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis wawancara semi struktur (*In-dept Interview*), dimana dalam melakukan wawancara peneliti lebih bebas jika dibandingkan wawancara yang terstruktur. Tujuan dari wawancaa ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih

³ *Ibid.* hlm.137

terbuka, selain itu informan diminta untuk berpendapat dan mengeluarkan ide-idenya. Sehingga dalam melakukan penelitian seorang peneliti harus mendengarkan dengan seksama dan teliti serta mencatat apa saja yang dikemukakan oleh informan.

2. Penelusuran Dokumen⁴

Teknik pengumpulan data dengan penelusuran dokumen merupakan pelengkap sumber data dari hasil wawancara dalam sebuah penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini adapun penelusuran data yaitu berupa dokumen RTRW Kabupaten Nganjuk tahun 2010-2030, RTRW Provinsi Jawa timur tahun 2011-2031, draft LP2B Kabupaten Nganjuk, LP2KD Kabupaten Nganjuk.

3.3 Teknik Penentuan Informan

Dalam penelitian ini, Informan ditentukan dengan teknik *snowball sampling*. Jadi, informan akan dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu, terlebih bagi mereka yang memang terlibat langsung dalam tema dan judul yang telah ditetapkan oleh peneliti yaitu “Politik Tata Ruang Industrialisasi di Kabupaten Nganjuk”. Adapun informan dari Penelitian ini adalah:

Tabel 3.1 Daftar Informan

No	Nama	Kriteria
1.	Bapak Muji	Selaku Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian dan Pembangunan di Bappeda Kabupaten Nganjuk

⁴ *Ibid*

2.	Ibu Karimah	Selaku Kepala Bidang Perekonomian di Bappeda Provinsi Jawa Timur
3.	Bapak Agus	Selaku Kepala Bidang Perencanaan di Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk
4.	Bapak Heni .R	Selaku Kepala Bidang Perencanaan di Dinas Perindustrian Kabupaten Nganjuk
5.	Drs. Sudrajat	Selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk
6.	Ibu Siti Aisiyah	Selaku Kepala Desa Jekek, Kabupaten Nganjuk
7.	Bapak Slamet	Selaku Warga yang tananhnnya pernah dibeli untuk lahan Industri.

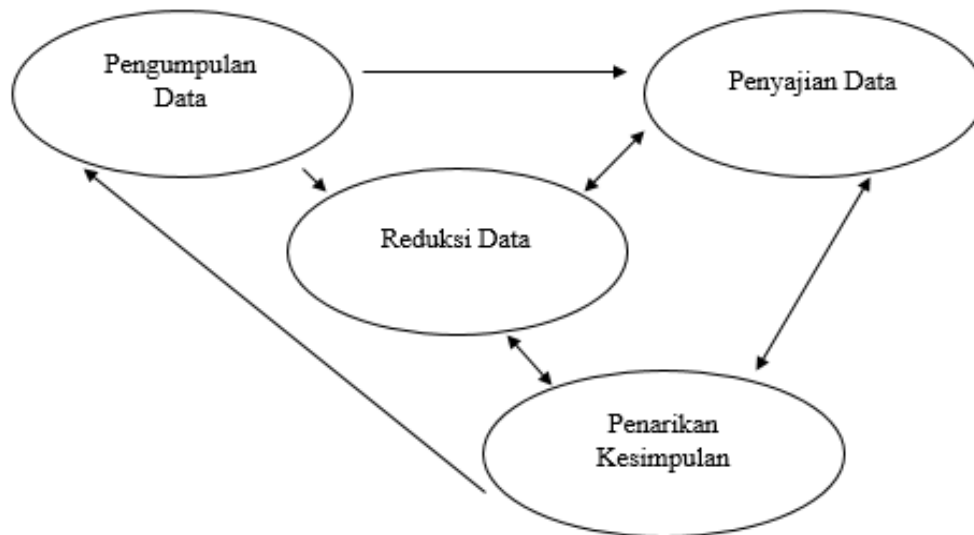
(Sumber: Diolah oleh Penulis, 2018)

3.4 Teknik Analisis data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah model Miles dan Huberman, ia mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Berikut adalah tahapan dalam melakukan teknis analisis data⁵:

⁵ M. Ferdiansyah. 2015. *Dasar Penelitian Kualitatif*. Palembang: Herya Media

Gambar 3.1 Komponen Analisis Data Milles dan Huberman



(Sumber: M. Ferdiansyah, Dasar Penelitian Kualitatif)

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara turun lapangan secara langsung di lokasi penelitian serta peneliti juga melakukan penelusuran dokumen.

b. Reduksi data

Reduksi data merupakan data yang diperoleh dari lapangan dan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan terperinci. Biasanya masih berupa catatan-catatan kasar yang kemudian data tersebut ditelusuri kembali dan dipilah menjadi data-data terkait tata ruang yang masuk dalam penelitian.

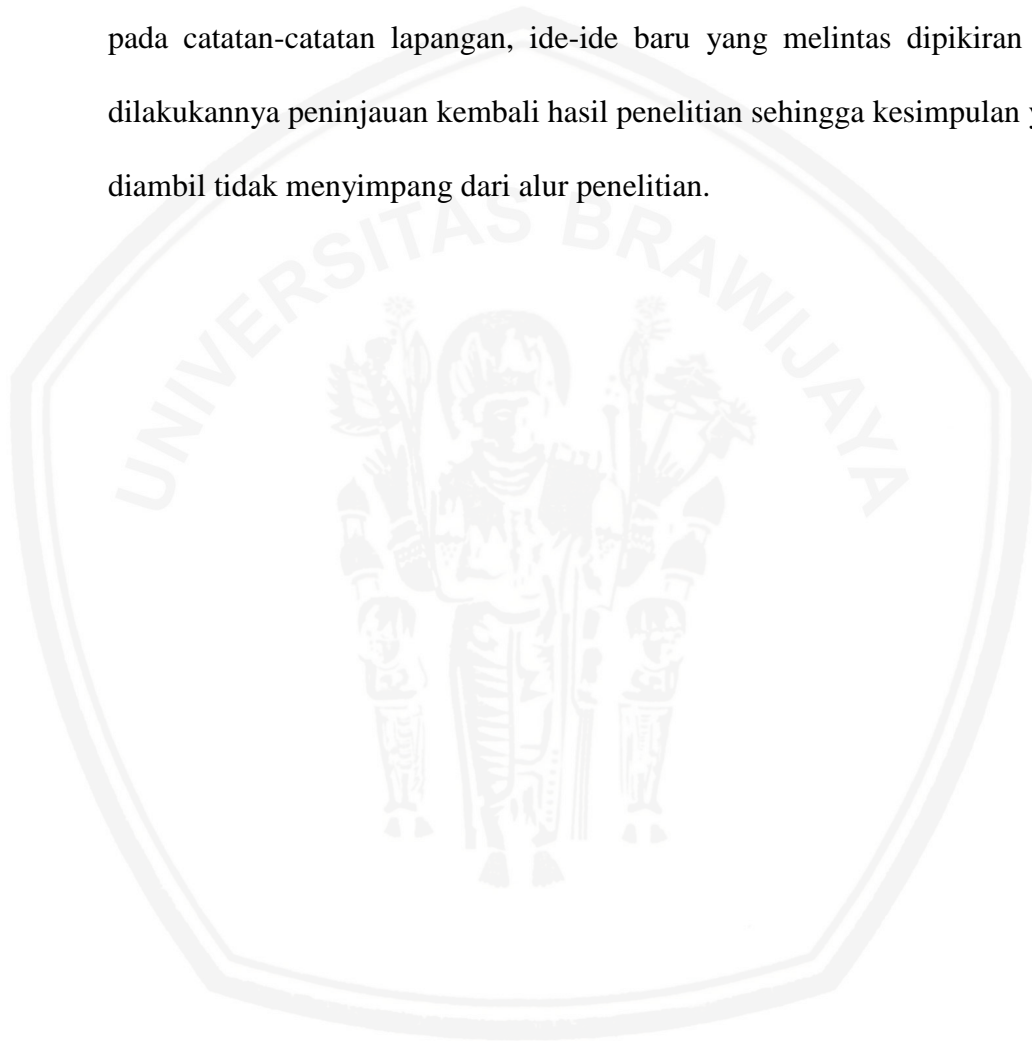
c. Penyajian data

Data yang telah tersusun sedemikian rupa sehingga memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Pada penelitian

kualitatif, penyajian data berupa teks naratif termasuk data yang berupa angka dan diuraikan dalam bentuk kata dan kalimat.

d. Kesimpulan

Selama penelitian berlangsung, dilakukan juga verifikasi untuk tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, ide-ide baru yang melintas dipikiran atau dilakukannya peninjauan kembali hasil penelitian sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari alur penelitian.



BAB IV

GAMBARAN UMUM

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Nganjuk

Kabupaten Nganjuk merupakan salah satu Kabupaten di Jawa timur yang letaknya berada di bagian sebelah barat dari Provinsi Jawa timur dengan titik koordinat $111^{\circ}5'$ - $112^{\circ}13'$ Bujur Timur dan $7^{\circ}20'$ - $7^{\circ}50'$ Lintang Selatan¹. Jumlah penduduk Kbpupaten Nganjuk pada tahun 2016 yaitu 1.045.375 jiwa dengan rincian 519.717 jiwa penduduk laki-laki dan 525.658 jiwa adalah penduduk perempuan². Selanjutnya, Luas wilayah administratif Kabupaten Nganjuk adalah 122.433,1 Ha yang terbagi atas 20 kecamatan, 264 desa dan 20 kelurahan, dengan batas-batas wilayah, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kediri dan Kabupaten Tulungagung, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Jombang dan Kabupaten Kediri, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Madiun³.

Tata guna tanah wilayah Kabupaten Nganjuk yaitu meliputi daerah pemukiman seluas 15.344 ha (12,53%), lahan sawah seluas 43.000 ha (35,2%), tegal seluas 14.432 ha (11,79%), perkebunan seluas 260 ha (0,21%), hutan seluas 47.007 ha (38,39%), dan lainnya seluas 2.395 ha (1,96%).⁴

¹ Bappeda. 2017. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Nganjuk 2016. Nganjuk. hlm. I/30-4

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*, hlm. I/30-6

Tabel 4.1 Luas Wilayah Menurut Jenis Tanah

No	Kecamatan	Jenis Tanah			Jumlah (ha)
		Sawah (ha)	Kering (ha)	Hutan (ha)	
1	Sawahan	1.117,0	2.554,9	7.916,7	11.588,6
2	Ngetos	1.586,0	1.822,8	2.612,4	6.021,2
3	Berbek	2.005,9	1.173,6	1.650,2	4.830,0
4	Loceret	2.766,5	1.968,9	2.134,1	6.869,2
5	Pace	2.794,7	1.884,4	166,6	4.845,7
6	Tanjunganom	4.028,8	3.055,4	0	7.084,2
7	Prambon	2.442,2	1.673,6	0	4.115,8
8	Ngronggot	1.979,2	3.319,3	0	5.298,5
9	Kertosono	1.194,6	1.072,9	0	2.267,5
10	Patianrowo	1.929,5	1.629,8	0	3.559,3
11	Baron	2.115,3	1.564,9	0	3.680,2
12	Gondang	3.544,4	2.176,2	3.873,7	9.594,3
13	Sukomoro	2.742,1	796,7	0	3.538,8
14	Nganjuk	1.194,4	1.064,2	0	2.258,6
15	Bagor	2.355,4	1.155,6	1.604,3	5.115,3
16	Wilangan	1.132,5	598,5	3.332,9	5.063,9
17	Rejoso	4.310,6	1.489,2	9.366,5	15.166,3
18	Ngluyu	1.036,5	929,1	6.649,3	8.614,9
19	Lengkong	1.604,8	1.156,2	5.956,3	8.717,3
20	Jatikalén	1.106,0	1.353,5	1.744,0	4.203,5
	Jumlah	42.986,4	32.439,7	47.007,0	122.433,1

(Sumber: Statistik Kabupaten Nganjuk)

Sebelah barat daya dari Kabupaten Nganjuk merupakan daerah pegunungan (Gunung Wilis) dengan ketinggian 1.000 sampai dengan 2.300 m DPL, wilayah ini potensial untuk tanaman perkebunan dan holtikultura. Bagian tengah merupakan dataran rendah dengan ketinggian 60-140 m DPL, merupakan daerah pertanian tanaman pangan dan holtikultura sedangkan bagian utara merupakan daerah pegunungan (Pegunungan Kendeng) dengan ketinggian 60-300 m DPL, yang

merupakan daerah hutan jati, lahan potensial untuk tanaman tembakau dan bahan galian kapur⁵.

Sebagian besar kecamatan berada pada dataran rendah dengan ketinggian antara 46 meter sampai dengan 95 meter di atas permukaan laut. Sedangkan 4 (empat) kecamatan berada pada daerah pegunungan dengan ketinggian 150 meter sampai 750 meter di atas permukaan laut. Daerah tertinggi terletak di Desa Ngliman Kecamatan Sawahan. Pada bagian dataran rendah, keadaan air tanah merupakan air tanah dangkal⁶.

Kabupaten Nganjuk dilewati oleh Kali Widas yang berasal dari Kabupaten Madiun dan Kali Kuncir yang melewati Kota Nganjuk di bagian utara dan selatan. Kedua sungai tersebut bertemu di Kali Kedungsoko yang mengalir ke utara bertemu dengan Kali Widas. Kali Widas tersebut mengalir ke timur melalui Kecamatan Lengkon dan bermuara di Kali Brantas yang merupakan batas wilayah kabupaten Nganjuk bagian timur⁷.

4.2 Gambaran Umum sektor Pertanian Kabupaten Nganjuk

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi paling besar dalam pemasukan daerah Kabupaten Nganjuk⁸. Dokumen Hasil Survei Luas Sawah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014 menunjukkan Kabupaten Nganjuk memiliki potensi lahan pertanian seluas 50.873,21 ha, terdiri dari lahan pertanian sawah irigasi teknis seluas 36.709,28 ha dan lahan pertanian sawah irigasi non teknis seluas 5.977,31 ha serta lahan pertanian bukan sawah (tegalan) seluas

⁵ *Ibid*, hlm. I/30-4

⁶ *Ibid*.

⁷ *Ibid*.

⁸ Bappeda Kabupaten Nganjuk, LP2KD, Nganjuk, hlm.15

8.186,62 ha. Tabel 4.1 menunjukkan sebaran lahan pertanian di Kabupaten Nganjuk per Kecamatan pada tahun 2014.

Tabel 4.2 Potensi Lahan Kabupaten Nganjuk tahun 2014

No	Kecamatan	Sawah Irigasi (ha)	Sawah Non Irigasi (ha)	Tegal (ha)	Total
1	Prambon	2.388,81	-	37	2.425,81
2	Kertosono	1.054,64	-	190,43	1.245,07
3	Ngronggot	1.946,75	-	718,5	2.665,25
4	Tanjunganom	4.007,18	-	271,45	4.278,63
5	Sawahan	896	8	1.931,80	2.835,80
6	Loceret	2.576,95	118,9	1.057,08	3.752,93
7	Wilangan	1.182,14	-	-	1.182,14
8	Berbek	1.758,00	-	-	1.758,00
9	Bagor	2.205,68	269,5	149,19	2.624,36
10	Ngetos	1.628,00	-	732	2.360,00
11	Lengkong	891,68	838,4	444,02	2.174,10
12	Pace	2.789,07	-	-	2.789,07
13	Sukomoro	2.543,42	135,84	92,92	2.772,18
14	Nganjuk	1.159,67	52	82,98	1.294,65
15	Gondang	2.195,98	1.501,36	1.027,35	4.724,69
16	Rejoso	3.848,54	648,46	21,1	4.518,10
17	Ngluyu	189	827,5	571	1.587,50
18	Jatikalén	928,12	-	553,61	1.481,73
19	Patianrowo	665	1.677,35	393,32	2.735,67
20	Baron	2.062,80	-	597,9	2.660,70
	Kabupaten Nganjuk	36.917,43	6.077,31	8.871,65	51.866,38

(Sumber: Dokumen hasil survei lahan pertanian Kabupaten Nganjuk 2014)

Komoditas utama sektor pertanian Kabupaten Nganjuk antara lain adalah padi, kedelai, jagung serta bawang merah, bahkan bawang merah di Kabupaten Nganjuk mampu menembus pasar nasional dan berhasil menjadikan Kabupaten Nganjuk sebagai daerah sentra bawang merah terbesar di Jawa timur⁹.

⁹*Ibid.*

Tabel 4.3 Lima Komoditas Utama Pertanian di Kabupaten Nganjuk 2014-2016

Komoditi Utama	PRODUKSI			
	Satuan	2014	2015	2016
1. Padi	Ton	582.810,98	623.267,47	711.244,77
2. Jagung	Ton	203.953,03	218.815,51	168.528,65
3. Kedelai	Ton	19.274,19	22.416,15	18.466,89
4. Bawang Merah	Kw	1.402.290	1.428.168	1.306.634

(Sumber: Dinas Pertanian Tahun 2016)

Selain penghasil lima komoditas utama tersebut, Kabupaten Nganjuk juga menghasilkan komoditas buah-buahan dan sayuran yang sangat bagus, diantaranya melon, semangka, mangga, jeruk, durian, alpokat, duku, rambutan, pepaya, sawo dan salak, cabe, sawi, tomat kacang-kacangan dan lain sebagainya. Meskipun sektor pertanian sampai saat ini masih terus menjadi sektor unggulan yang menduduki peringkat pertama dalam kontribusi PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), namun sejatinya sektor ini perlu sebuah perhatian khusus dari berbagai pihak, karena produktifitasnya dari tahun ketahun mengalami penurunan. Misalnya pada tahun 2012 kontribusi sektor pertanian sebesar 34,36 % turun menjadi 33,63 % pada Tahun 2013 dan terakhir pada Tahun 2016 peranannya menjadi 32,02 %¹⁰. Untuk itu diperlukan berbagai upaya baik dari pemerintah,

¹⁰ Badan Pusat Statistika Kabupaten Nganjuk, *Op.cit.*, hlm.23

masyarakat dan pihak terkait untuk mencegah terjadinya penurunan yang semakin besar pada sektor pertanian ini.

4.3 Gambaran Umum Sektor Industri di Kabupaten Nganjuk

Sektor industri di Kabupaten Nganjuk merupakan sektor yang saat ini terus mengalami perkembangan yang pesat, terhitung saat ini sudah ada kurang lebih 21 perusahaan besar yang telah beroperasi disana¹¹. Berikut adalah tabel Industri besar di Kabupaten Nganjuk

Tabel 4.4 Data Perusahaan di Kabupaten Nganjuk

No.	Nama Perusahaan (Sudah memiliki izin)	Alamat
1.	LOTUS INDAH TEKSTIL INDUTRI	Ds. Kedungsoko & Ds. Nglundo, Kec. Sukomoro
2.	UD. SUMBER PLASTIK	Ds. Sambirejo, Kec. Tanjunganom
3.	BAYU BAGUS BAKERY	Kec. Baron
4.	PT. KARISMA BARU INDONESIA	Ds. Kerep Kidul, Kec. Bagor
5.	PT. SUNMOON STAR	Ds. Pelem, Kec. Kertosono
6.	PT. KERTA RAJASA JAYA	Ds. Jekek, Kec. Baron
7.	PT. GELORA JAYA	Ds. Pelem, Kec. Kertosono
8.	PT. KARYA NIAGA BERSAMA	Ds. Kedungdowo, Kecamatan Nganjuk

¹¹ Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Nganjuk, 2018, Data Perusahaan di Kabupaten Nganjuk. Nganjuk. hlm.1

9.	PT. ROKTAMA ADI CITRA	Kel. Kedodondong, Kec. Bagor
10.	PT. MITRA SARUTA INDONESIA	Ds. Kedungdowo, Kecamatan Nganjuk
11	PT. JAYA KERTAS	Ds. Pelem, Kec. Kertosono
12.	PT. HELINA	Kec. Lengkong
13.	PT. CAHAYA POLES MULIA	Kecamatan Jaticalen
14.	PG. LESTARI	Lestari, Kec. Patianrowo
15.	PT. DWI TUNGGA UTAMA CHEMICAL	Ds. Kurungrejo, Kec. Prambon
16.	PT. KASA HUSADA	Ds. Krangsono. Kec. Loceret
17.	PT. MULIA RAJASA TEKSTIL	Kedungdowo, Nganjuk, Mungkung, Rejoso
18.	PT. PODO RUKUN ABADI	Ds. Sambirejo, Kec. Tanjunganom
19.	PT. INDOPRIMA GEMILANG	Ds. Plimping, Kec. Baron
20.	PT. INTI WIRA ENGINEERING	Ds. Babadan, Kec. Patianrowo
21.	PT. TRI JAYA LESTARI	Ds. Prayungan, Kec. Lengkong
22.	PT. KAPASARI	Ds. Kedungrejo, Kec. Baron
No.	Dalam Proses Perizinan	Alamat
1.	PT. YOUNG FREE	Kec. Lengkong
2.	PT. MITRA JAYA	Ds. Begendeng, Kec. Jaticalen
3.	PT. BAJA ELEKTRIK	Kec. Lengkong

4.	PT. SURA INDAH WOOD INDUSTRIES	Ds. Kepuh, Kec. Kertosono
5.	PT KERTA RAJASA RAYA II	Ds. Mlorah, Kec. Rejoso
6.	PT. AVRINDO ABADI	Ds. Gebang Kerep, Kec. Baron
7.	PT. MITRA SARUTA INDONESIA II	Ds. Ngangkatan, Kec. Rejoso

(Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Nganjuk)

Selain industri besar, Kabupaten Nganjuk sejatinya lebih di dominasi oleh industri menengah, industri kecil dan kerajinan rumah tangga. Industri kecil ini juga bisa dikelompokkan menjadi industri formal dan industri non formal. Jumlah industri formal di Kabupaten Nganjuk pada Tahun 2012 sebanyak 819 unit dan non formal 15.180 unit. Jumlah tersebut meningkat pada Tahun 2016 yaitu menjadi 1.216 unit dan industri non formal sejumlah 15.451. Penyerapan tenaga kerja di industri formal dan non formal pada Tahun 2012 adalah 14.842 orang dan 43.160 orang. Sedangkan pada Tahun 2016 meningkat yaitu menjadi 17.493 dan 44.271 orang¹².

Jika dilihat dari nilai investasinya industri Formal dan non formal pada Tahun 2016 adalah 19.376 Milyar Rupiah dan 72.207 Milyar Rupiah. Pada Tahun 2016 nilai produksi untuk industri formal 2.999.432 Milyar Rupiah dan non formal 1.895.561 Milyar Rupiah. Nilai produksi kedua kelompok tersebut meningkat pada

¹² *Ibid.*

Tahun 2016 yaitu kelompok formal 2.999.432 milyar Rupiah dan kelompok non formal menjadi 1.895.561 Milyar Rupiah¹³.

Sektor Informal juga merupakan sektor yang penting sebagai pelaku ekonomi akan tetapi sektor ini meskipun mempunyai nilai produksi yang besar tetapi belum bisa terjangkau oleh pendataan yang baik.

Tabel 4.5 Perkembangan Usaha Industri di Kab.Nganjuk tahun 2012-2016

JENIS DATA		TAHUN					SATU AN
		2012	2013	2014	2015	2016	
a. Industri Non Formal							
	1. Unit Usaha	15.180	15.207	15.275	15.299	15.451	Buah
	2. Tenaga Kerja	43.160	43.628	43.675	43.833	44.271	Orang
	3. Nilai Produksi	1.708.881	1.794.325	1.875.071	1.876.193	1.895.561	Milyar Rp.
	4. Nilai Investasi	17.327	18.193	19.030	19.184	19.376	Milyar Rp.
b. Industri Kecil Menengah (Formal)							
	1. Unit Usaha	819	1.060	1.114	1.146	1.216	Unit
	2. Tenaga Kerja	14.842	16.172	17.045	17.185	17.493	Orang
	3. Nilai Produksi	2.711.808	2.847.398	2.984.073	2.990.113	2.999.432	Milyar Rp.
	4. Nilai Investasi	63.841	67.033	70.289	70.714	72.207	Milyar Rp.

(Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk Tahun 2014)

Melihat hal tersebut pemerintah Kabupaten Nganjuk saat ini terus mengupayakan agar sektor industri terus mengalami pertumbuhan dan tentunya memberikan manfaat bagi masyarakat.

¹³ *Ibid.*

BAB V

KONTESTASI POLITIK TATA RUANG INDUSTRIALISASI DI KABUPATEN NGANJUK

5.1 Dinamika Ruang Kabupaten Nganjuk Pra-Industrialisasi

Kabupaten Nganjuk merupakan salah satu daerah di Jawa timur yang masih tergolong rendah dalam tingkat pertumbuhan ekonominya dibanding dengan daerah tetangga yaitu Kediri dan Jombang.¹ Hal ini disebabkan karena masih minimnya nilai investasi yang ada, serta belum adanya sektor unggulan sebagai penyokong pertumbuhan ekonomi daerah selain sektor pertanian yang memang selama ini menjadi sektor utama di Kabupaten Nganjuk, dimana lebih dari 50% dari total lahan 122.433,1 Ha digunakan sebagai lahan pertanian.² Adapun rincian pemanfaatan lahan Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1 Tata Guna Tanah Kabupaten Nganjuk

No.	Peruntukan Lahan	Luas (Ha)	Prosentase
1.	Permukiman	15.344	12,53%
2.	Persawahan	43.000	35,2%
3.	Perkebunan	260	11,79%
4.	Tegal	14.432	0,21%
5.	Hutan	47.007	38,39%

¹ Atho'ul. 2014. Perubahan Penggunaan Lahan di Kabupaten Nganjuk. Surabaya. hlm. 1

² Bappeda Kabupaten Nganjuk, Op.cit. hlm.I/30-6

6.	Lainnya	2.395	1,96%
----	---------	-------	-------

(Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Bupati Kabupaten Nganjuk)

Kabupaten Nganjuk sendiri di Jawa timur memiliki fungsi sebagai daerah penghubung, kerana kondisi lokasi dan jarak tempuh menuju pusat kota (Surabaya dan Sidoarjo) masih tergolong jauh dan hanya mengandalkan akses jalan kereta api dan jalan raya yang masih rawan akan kemacetan. Kabupaten Nganjuk sendiri dilewati oleh jalan nasional sepanjang 27,79 Km, Jalan raya Provinsi sepanjang 38,67 Km, Jalan raya Kabupaten/Kota sepanjang 1.153,48 Km.

Seiring berjalannya waktu, saat ini Kabupaten Nganjuk telah mengalami banyak sekali perubahan terutama dalam hal pemanfaatan ruang dimana sektor industri sudah mulai berkembang dengan pesat didukung dengan akses jalan yang semakin mudah setelah adanya proyek pembangunan jalan tol yang saat ini sudah dalam tahap akhir pengerjaan, selain itu proyek pembangunan jalan ganda kereta api yang akan semakin mempermudah akses keluar dan masuk Kabupaten Nganjuk. sehingga diharapkan dengan kemudahan tersebut akan mampu mengangkat perekonomian Kabupaten Nganjuk menjadi lebih baik.

5.2 Perspektif Pemerintah Daerah dan Masyarakat terhadap Industrialisasi di Kabupaten Nganjuk

Tabel 5.1 Cara Pandang aktor dalam melihat perkembangan industri di Kabupaten Nganjuk

No.	Aktor	Cara Pandang
1.	Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa timur	<ul style="list-style-type: none"> • Menyatakan setuju dengan adanya industrialisasi di Kabupaten Nganjuk. • Pihak Bappeprov merasa memang sulit untuk daerah menerapkan Kebijakan LP2B.
2.	Badan Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten Nganjuk	<ul style="list-style-type: none"> • Menyatakan setuju dengan adanya industrialisasi di Kabupaten Nganjuk. • Pihaknya menyatakan LP2B merupakan konsep yang terlalu ideal. • Bappeda merasa perlu adanya review RTRW lama.
3.	Dinas Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> • Pihak Dinas Pertanian sepakat dengan Bappeda yang menyatakan setuju dengan adanya industrialisasi di Kabupaten Nganjuk. • Salah satu faktor penurunan produktivitas pertanian adalah pengalih fungsian lahan • Dinas Dinas Pertanian menyerahkan keputusan LP2B kepada pihak Bappeda.
4.	Dinas Perindustrian	<ul style="list-style-type: none"> • Pihak Disperindag Setuju dengan Industrialisasi di Kabupaten Nganjuk. • Pihaknya tidak ada wewenang terkait perizinan. • Disperindag menyerahkan sepenuhnya LP2B ke pihak Bappeda.

5.	Kepala Desa Jekek	<ul style="list-style-type: none"> • Menyatakan setuju dengan industrialisasi di daerah Nganjuk. • Pihak perangkat Desa tidak ada wewenang terkait pemberian izin.
6.	Masyarakat yang tanahnya dibeli	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat Nganjuk merasa diuntungkan dengan masuknya industri. • Tidak ada sosialisasi dari pihak pemerintah terkait LP2B.

(Sumber: diolah oleh penulis)

Dalam memahami cara pandang aktor terhadap industrialisasi dan keberlangsungan sektor pertanian di Kabupaten Nganjuk, penulis melakukan sebuah wawancara dengan beberapa aktor yang berasal dari pihak Pemerintah daerah, Pemerintah provinsi dan juga perangkat desa di Kabupaten Nganjuk, dari wawancara tersebut diperoleh hasil yang kemudian akan dijelaskan secara terperinci dari setiap aktornya sebagai berikut:

a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Nganjuk

Dalam melakukan penelitian di BAPPEDA Kabupaten Nganjuk penulis memperoleh hasil bahwa pihak Bappeda menyatakan setuju dengan adanya pertumbuhan industrialisasi yang ada di Kabupaten Nganjuk saat ini, karena sektor industri dinilai mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pemasukan daerah, seperti apa yang dikatakan oleh Kepala Bagian Penataan Umum BAPPEDA Kabupaten Nganjuk yaitu bapak Muji:

“Terkait pembangunan industrialisasi menurut saya pribadi merupakan sebuah proses atau tahap dimana untuk saat ini itu menjadi sebuah

tuntutan untuk semua daerah, tidak terkecuali Kabupaten Nganjuk, yang mana dari setiap proses tersebut nantinya untungnya juga kemasayarakat juga. Kan bisa kita lihat dari PDRB, sektor industri kita saat ini memang sudah terus mengalami perbaikan, banyak sekali investor yang perlahan-lahan tertarik dengan daerah kita. Tentu dengan realitas seperti ini kita menyambut positif.”³

Apa yang disampaikan Bapak Muji bukan tanpa alasan, dia berpendapat bahwa tidak ada masalah mengorbankan lahan pertanian untuk industri, karena menurutnya Kabupaten Nganjuk selama kurang lebih 20 tahun kedepan masih defisit persediaan pangan. Dengan ungkapan tersebut, secara tidak langsung menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk terkesan egois, karena jika kita berbicara tentang persediaan pangan, tentu tidak hanya menyangkut Kabupaten Nganjuk secara individu, melainkan menyangkut kesejahteraan seluruh daerah di Indonesia. Selanjutnya, beliau menambahkan bahwa dari industri baik pihak pemerintah dan masyarakat banyak mendapat keuntungan. Dari pihak masyarakat tentu akan menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran sedangkan pihak Pemerintah daerah mendapat keuntungan dari pajak. Seperti apa yang di sampaikan oleh Bapak Muji berikut ini:

“ Ooo... tentu kita sangat menyambut positif datangnya beberapa industri di daerah kita, karena industri sendiri kan Didalam tataruang kita kan udah meng-uploadkan industri, dan itu semua karna sudah terencana jadi kita sudah punya gambaran, ya dulu kaitannya dengan sekolah sebelum kita menetapkan industri kita sudah mrencanakan bagaimana kedepannya sehingga pada saat industri sudah mulai masuk kita dapat memfasilitasi dan banyak daerah atau kabupaten yang tidak merencanakan dan akhirnya mereka repot kan, jadi pada saat ada investasi masuk rencana tata ruangnya tidak memfasilitasi itu yang jadi masalah, nah lahan-lahan kita kan banyak sekali contoh pertanian, ada yang lahan produktif dan ada lahan yang kurang produktif nah dari lahan pertanian kan yang kita korbkan hanya berapa persennya saja,

³ Wawancara dengan Bapak Muji, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk, tanggal 25 mei 2018

tapi itu terbayar dari manfaat yang kita ambil contoh untuk industri gampangannya kita berkorban 1 hektar, tanah satu hektar kalau bagus itu kita dapat 7 ton, 7 ton itu kira-kira bisa buat makan 10 KK(Kartu Keluarga) dalam 1 tahun. Nah!!! kalau dibuat pabrik itu nanti bisa buat memperkejakan berapa orang?, banyak sekali kan. Itu untuk yang kerja saja, belum dampaknya nanti terhadap sektor-sektor lain kan akan tumbuh semua, nah itu harus kita pikirkan artinya rata-rata kota seperti itu memang berubahnya seperti itu yang penting kita selektif. Walaupun kita harus mengorbankan dan memang kita harus berkorban. Dari berkorban ini, Memang lahan nantinya kita akan berkurang. namun 20 thn kedepan kita diprediksikan akan masih mampu mencukupi kebutuhan pangan lokal. Kan kita rencanakan 20 ribu hektar misalnya itupun ada yang teknis dan non teknis tapi kalau rencana sekian ribu hektar ini terlaksana kan bisa menagkap orang bekerja itu sekian puluh ribu, inikan pemicu besar sektor-sektor lain berkembang mulai dari perumahan, ekonomis semuanya pasti akan berkembang.”⁴

Selanjutnya untuk mengganti lahan produktif yang telah digunakan lokasi industri, yang kemudian berdampak pada menurunnya produktivitas sektor pertanian, pihak BAPPEDA mempunyai solusi lain dengan cara menjadikan lahan yang kurang produktif sebagai sumber galian yang nantinya tanah hasil galian akan dijadikan tanah uruk yang akan dijual kepada pemasok. Sehingga akan menutupi kerugian akibat penurunan sektor pertanian.

Sejatinya untuk mengantisipasi konversi lahan pertanian yang semakin hari semakin besar, Pemerintah Provinsi Jawa timur telah memberikan sebuah anjuran untuk setiap daerah, termasuk Kabupaten Nganjuk untuk membuat sebuah data LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan), dimana lahan yang telah ditetapkan tidak boleh dirubah lagi statusnya, kalau dalam praktiknya ada lahan yang telah ditetapkan sebagai LP2B namun masih saja ada praktik pengalih fungsian lahan menjadi lahan industri dan lain sebagainya, maka akan ada sanksi yaitu penggantian

⁴ *Ibid.*

2 kali lipat dari lahan yang telah dialih fungsikan⁵. Namun, yang menjadi kendala pengalihfungsian lahan di Kabupaten Nganjuk adalah sampai saat ini peraturan tentang LP2B ini belum ada kepastian, adapaun penjelasan terkait hal ini yang disampaikan oleh Bapak Muji adalah sebagai berikut:

“ Mengenai wacana LP2B dari pihak Provinsi ke beberapa daerah ya itu, bukan hanya Nganjuk. Menurut saya konsep tersebut terlalu ideal untuk konteks masa kini. Mengapa? Karena masak iya kita dituntut untuk melindungi lahan, sedangkan ga semuanya bisa kita jaga. Terlebih sektor pertanian sendiri kan akhir-akhir ini sedikit megalami penurunan produktivitas, jadi pihak kita juga mencari solusi lain, selain itu kota-kota sebelah kita seperti Kediri, jombang dan Mojokerto sudah terlebih dahulu melakukan proses industrialisasi dan mereka sukses, masak kita ga bisa.”⁶

Sampai saat ini, masih terus dilakukan kajian tentang peraturan LP2B, termasuk Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan ditargetkan selesai pada akhir 2018 ini. Sehingga dapat dikatakan bahwa Kabupaten Nganjuk sampai saat ini belum memiliki landasan hukun yang kuat terkait industrialisasi dan pengendalian pemanfaatan ruang, sehingga realitasnya banyak sekali lahan pertanian yang produktif dijadikan lokasi pendirian pabrik.

b. Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk

Dalam melakukan wawancara di Dinas Pertanian, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Perencanaan yaitu Bapak Agus. Dari wawancara diperoleh hasil yang mengejutkan bahwa Dinas Pertanian menyatakan setuju dengan adanya perkembangan industri di Kabupaten Nganjuk, dengan alasan bahwa masyarakat Nganjuk saat ini tidak bisa hanya menggantungkan penghasilan

⁵ Wawancara dengan Ibu Karimah, Badan Perencanaan dan Pembangunan Provinsi Jawa timur, tanggal 30 mei 2018

⁶ Wawancara Bapak Muji, *Opcit.*

dari sektor pertanian yang saat ini mengalami pasang surut, selain itu industri nantinya akan mampu menekan angka urbanisasi masyarakat Nganjuk. seperti yang

Bapak Agus katakalah, bahwa:

“Sebernya ya gapapa, *lek menurutku* (Kalau menurutku), tapi ya jangan terlalu, ya mau gimana lagi ya, ya pokonya kalo bisa yang berkaitan dengan pertanian. Tapi kenyataannya kan engga. Kalo dulu RTRW kan emang sepanjang jalan ke arah Rejos, tapi kalau RTRW yang baru ini kayaknya di sentral kan ke daerah utara dari sungai widas. Sebernya kalau di sepanjang jalan ini kan ya sayang ya, soalnya kan tanahnya subur dan produktif. Tapi ya sudah terlanjur mau gimana lagi Heheheheee.... kalau menurut saya kan kalau misalkan disuruh pertanian terus kan memang kurang menguntungkan masyarakat Nganjuk, apalagi musim gak menentu seperti sekarang. Logikanya misalkan petani padi panen dijual dengan harga 5000/kg, itu sekitar 2jt berarti perbulan. nah itu kan sangat kurang, apalagi yang anaknya banyak. *Kalo* industri kan lebih menguntungkan, bisa buat buka kos-kosan, kerja juga ga perlu keluar kota. Buat daerah tentunya juga menguntungkan sekali.”⁷

Kemudian saat disinggung terkait ada tidaknya ketakutan bahwa sektor industrialisasi nantinya akan berdampak buruk terhadap pertanian, beliau menjelaskan bahwa:

“Ya pastinya ada ya mas, apalagi kan makin hari semakin banyak lahan kita yang dialih fungsikan menjadi pabrik, perumahan, pertokoan dsb. Nah hal ini ditakutkan suatu hari nanti kita tidak mampu mencukupi kebutuhan pangan lokal, ya mungkin untuk saat ini masih sangat jauh dari dampak tersebut, tapi kan bukan tidak mungkin hal tersebut akan terjadi seiring terus berlangsungnya konversi lahan pertanian ke non pertanian.makanya kami terus mngupayakan agar ada subsidi bibit unggul kemudian pupuk serta alat pertanian yang lebih modern sehingga hal tersebut akan menumbuhkan semangat bagi para petani untuk melakukan kegiatan tani.”⁸

Selanjutnya untuk mengantisipasi kemungkinan buruk tersebut pihak Dinas Pertanian mengharapkan Pemerintah Kabupaten Nganjuk melakukan subsidi bibit

⁷ Wawancara Bapak Agus, Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk, tanggal 25 mei 2018

⁸ *Ibid.*

pertanian unggul dan juga alat bantu pertanian yang lebih modern sehingga akan memberikan motivasi lebih bagi para petani, beliau mengatakan bahwa:

“kami terus mengupayakan agar ada subsidi bibit unggul dari pemerintah kepada masyarakat, kemudian pupuk serta alat pertanian yang lebih modern sehingga hal tersebut akan menumbuhkan semangat bagi para petani untuk melakukan kegiatan tani.”

Kemudian berkaitan dengan kebijakan LP2B yang sampai saat ini belum terlaksana, pihak Dinas pertanian sepenuhnya menyerahkan urusan ini ke pihak BAPPEDA, sebab yang mempunyai wewenang untuk memasukkan usulan draft RTRW ke dalam RTRW adalah BAPPEDA, terkait hambatan dari penerapan LP2B adalah seperti yang beliau katakan:

“Belom, *nganune* kan, *opo*? Perda (Peraturan daerah) nya belom ada, kita belom tahu hasil review RTRW ini seperti apa, sebenarnya kalo sudah termuat dalam RTRW kita sudah tidak perlu lagi membuat aturan atau Perda LP2B. Kalo dulu kan memang sejak tahun 2009 setelah 2 tahun berjalan kan harus membuat Perda LP2B, cuman kan review RTRW kan kita baru nyusun tahun kemaren, sebenarnya rincian atau drafnya sudah ada, termasuk lahan mana yang menjadi P2B utama dan cadangannya, semua sudah termasuk disitu. hambatannya banyak sekali, seperti kapan hari kan sudah pernah saya sampaikan, Pak, semua lahan pertanian yang sudah di usulkan oleh dirjen pertanian semua harus disertakan, lah ternya jumlahnya 41.000. itu artinya semua lahan yang di Kabupaten Nganjuk wes ra oleh di utik2 (sudah tidak bisa di apa-apakan lagi). *Tapi trus lek gak oleh di utik-utik, trus wong nganjuk iso opo, seng masalah gae omah* (tapi terus kalo sudah tidak boleh di apa-apain lagi, trus masyarakat Nganjuk bisa apa, yang masalah bangun rumah) dll. Kalo di RTRW yang lama kan lahan sawah 34.000 trus lahan keringnya 16.000 atau berapa gitu. Ketemunya 51 atau berapa gitu, makanya tidak sama. Pokok semua yang menangani pihak Bappeda dan pihak ke tiga ITN kayaknya.”⁹

⁹ Ibid.

Yang terakhir beliau mempunyai harapan, meskipun nantinya industri berkembang pesat di Kabupaten Nganjuk, pemerintah dihimbau jangan mengabaikan sektor pertanian yang selama ini menjadi tumpuan daerah. Dengan lahan yang ada pemerintah harus berusaha mengoptimalkan lahan tersebut sehingga hasilnya juga maksimal.

c. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk

Dalam melakukan wawancara di kantor Dinas Perindustrian Kabupaten Nganjuk, Peneliti menemui Bapak Heni selaku Kepala bidang Perencanaan, sehingga diperoleh keterangan bahwa Dinas Perindustrian tentu sangat setuju dengan adanya industrialisasi di Kabupaten Nganjuk, karena hal ini akan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Saat dimintai keterangan lebih lanjut tentang proses industrialisasi dan data terkait dengan industri besar dari tahun ke tahun beliau mengatakan:

“Untuk industri yang masuk ke Nganjuk ini kan bukan wewenang kita untuk memberikan izin, Itu kan wewenang dari DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu). Saya sendiri masuk kesini kan baru mulai tahun 2017 jadi untuk detail memang ga begitu tau pastinya. Soalnya kami memang dinas industri ya tapi pihak kita cuma ada masalah tentang IMK (Industri Mengengah Kecil) saja, tapi untuk industri atau pabrik besar itu kami tidak ada datanya, yang ada itu justru di DPMPTSP atau gak di Bappeda. Soalnya kalo biasanya ada perusahaan mau berdiri tuh kita Cuma dikasih tau saja, ditempat A ini loh mau dibuat pabrik, tapi kita memang tidak ada wewenang buat itu semua.”

Sehingga bisa dikatakan bahwa dalam kaitannya dengan industrialisasi, pihak Dinas Pertanian hanya menangani untuk Industri Menengan Kecil (IMK) saja, sedangkan untuk masalah industri besar baik itu masalah perizinan dan lain sebagainya, bukan wewenang dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Tentu hal

ini menunjukkan bahwa relasi yang terjalin antar pemerintah daerah dengan kaitannya dengan industrialisasi berjalan kurang baik, karena seharusnya Dinas Perindustrian sebagai perangkat daerah yang bergerak dalam permasalahan industri mempunyai hak atas penentuan dan proses perizinan.

d. BAPPEDA Provinsi Jawa timur

Dalam melakukan penelitian di BAPPEDA Provinsi Jawa timur, penulis memperoleh hasil bahwa menurut Perda RTRW pasal 80 disebutkan bahwa setiap daerah di Jawa timur memang ada yang namanya proses industrialisasi, namun harus dibedakan, berikut keterangan dari Kepala bidang Ekonomi yaitu Ibu Karimah:

“Sebenarnya kalau masalah struktur industri di Jawa timur di semua daerah baik itu Kota atau Kabupaten ada sebuah daerah KPI (Kawasan Peruntukan Industri). nah kawasan peruntukan industri itu terbagi menjadi beberapa, ada yang namanya KI (Kawasan Industri) dimana industri ini sifatnya tersentralisir dan terintegrasi, kurang lebih kayak Kawasan Rungkut SIER, dimana semua urusan terintegrasi disitu. Misalkan kayak kalau mau ekspor impor kan ada izin, kalau pengusaha ingin membangun industri, pengurusannya cukup di kawasan tersebut. Trus kalo mengirim barang ke pelabuhan tanpa harus diperiksa lagi, tapi kalau misalkan barang produksi yang berasal dari bukan kawasan industri atau bisa disebut dengan Kawasan peruntukan industri itu masih harus diperiksa-periksa lagi. Bisa diibaratkan kalau Kawasan industri itu kayak sistem perumahan “Real Estate” jadi ada pagernya, ada satpamnya, ada fasilitas umumnya dsb. Jadi Kawasan industri ini bisa dimiliki oleh swasta, bisa dimiliki oleh Pemerintah.”¹⁰

Adapun bunyi Peraturan Daerah RTRW Provinsi Jawa timur 2011-2030 Pasal 80 adalah sebagai berikut:

¹⁰ Wawancara Ibu Karimah, Badan Perencanaan dan Pembangunan Provinsi Jawa timur, Tanggal 30 Mei 2018

- 1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana yang dimaksud pasal 72 huruf h direncanakan dengan luas sekurang-kurangnya 69.288,59 Ha meliputi:
 - a. Kawasan industri
 - b. Kawasan peruntukan industri diluar kawasan peruntukan industri; dan
 - c. Sentra industri
- 2) Kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada diseluruh wilayah kabupaten/kota di Jawa Timur dengan prioritas pengembangan meliputi:

a. Kabupaten Bangkalan;	h. Kabupaten Pasuruan;
b. Kabupaten Banyuwangi	i. Kabupaten Probolinggo;
c. Kabupaten Gresik	j. Kabupaten Sidoarjo;
d. Kabupaten Jombang	k. Kabupaten Tuban;
e. Kabupaten Lamongan	l. Kota Madiun; dan
f. Kabupaten Malang	m. Kota Surabaya.
g. Kabupaten Mojokerto;	
- 3) Kawasan peruntukan industri diluar kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. Kabupaten Bangkalan;	k. Kabupaten Ngawi;
b. Kabupaten Bojonegoro;	l. Kabupaten Pasuruan;
c. Kabupaten Gresik;	m. Kabupaten Probolinggo;
d. Kabupaten Jember;	n. Kabupaten Sidoarjo;
e. Kabupaten Jombang;	o. Kabupaten Situbondo;
f. Kabupaten Lamongan;	p. Kabupaten Tuban;

- g. Kabupaten Madiun;
- h. Kabupaten Malang;
- i. Kabupaten Mojokerto;
- j. Kabupaten Nganjuk;
- q. Kota Kediri;
- r. Kota Madiun; dan
- s. Kota Surabaya.

- 4) Sentra industri sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan diseluruh kabupaten/kota.

Jika dilihat dari RTRW Provinsi Jawa timur diatas bisa dilihat bahwa untuk Nganjuk sendiri masuk kedalam daerah peruntukan industri, untuk masalah mekanisme dan persyaratan khusus untuk daerah dalam kaitannya dengan industrialisasi, Ibu Karimah mengatakan bahwa sepenuhnya wewenang diserahkan kepada daerah, berikut adalah penjelasannya:

“Mekanisme untuk lebih detail tanya ke Kabupaten ya, soalnya kalau wewenang pemerintah Provinsi itu hanya sebatas pemberian IPR (Izin Pemanfaatan Ruang), misalnya mau ada industri berdiri di kawasan mana, lah ini izin pemanfaatan ruangnya di Provinsi. Misalnya ada investor butuh lahan 25 hektar di Kabupaten Nganjuk, dia izin itu ntar di daerah Kertosono gitu, dia meminta izin ke Pemprov, kemudian Pemprov akan melihat apakah Kertosono di RTRW boleh gak untuk industri, kalau misal boleh kita akan menurunkan surat izinnya, tapi untuk detail Kertosono sebelah mananya itu wewenang daerah. IPR ini berlakunya 3 tahun, kalau misalnya dalam kurun waktu tersebut tidak kunjung berdiri makan pihak investor harus melakukan prosedur dari awal lagi.”¹¹

Selanjutnya saat disinggung masalah penetapan Perda terkait LP2B yang sampai saat ini Kabupaten Nganjuk tak kunjung ada kepastian pihak BAPPEPROV melalui Ibu Karimah menyatakan bahwa:

¹¹ *Ibid.*

“Kalo masalah LP2B itu kan setiap daerah harus memiliki lahan pertanian, lah Nganjuk itu berapa hectar yang masuk pertanian pangan, itu ada di perda RTRW nya, kan di Provinsi Jawa timur kan ada sekian ribu lahan peruntukan pertanian, lah nganjuk berapa hectar serta lokusnya daerah mana saja, denger-denger masih dalam tahap review ya. Kalau di RTRW Jawa timur itu Cuma satuan luasnya saja, tapi untuk masalah lokasi di Kecamatan mana saja itu ada di RTRW Kabupaten Nganjuk. Terus yang menjadi penghambat belum adanya regulasi resmi di Nganjuk itu salah satunya yaitu untuk menyamakan luasan daerah LP2B itu betul betul sangat sulit. Ketika sebuah daerah sudah menentukan LP2B nya itu benar-benar sudah tidak bisa diubah lagi, jadi hanya boleh buat pertanian saja. Namun untuk keperluan industri, jalan tol buat perumahan dll itu kan butuh lahan to. Nah ini susah nya. Soalnya setiap hectar lahan yang dialihfungsikan harus diganti 2 kali lipat luas lahan yang semula. Jadi LP2B ini tidak mudah. Padahal ketika Pemerintah Provinsi menyusun, itu bertahun-tahun kita “matching” kan. Tapi tak kunjung selesai, padahal kita sebenarnya memperoleh data tersebut dari Kabupaten/Kota yang bersangkutan, namun ketika kemudian kita meminta detailnya, mereka gak jadi-jadi. Apalagi setelah ada pembangunan jalan tol yang memakan beberapa hektar sawah. Seperti itu.”¹²

Jadi, intinya adalah terkait dengan industrialisasi di Jawa timur, memang dalam Perda RTRW semua daerah ada industri, tidak terkecuali Kabupaten Nganjuk, Namun ada daerah yang sifatnya sebagai Kawasan Industri seperti di daerah Ngoro dan Rungkut, sedangkan Kabupaten Nganjuk adalah sebagai daerah peruntukan industri. terkait mekanisme dan himbauan khusus dari Pemerintah Provinsi ke daerah yang melakukan industrialisasi tidak ada, karena wewenang sepeunya diserahkan ke pihak daerah.

e. Kepala Desa Jekek

Penulis melakukan wawancara dengan salah satu Kepala desa di Kabupaten Nganjuk, yaitu Kepala desa Jekek yang bernama Ibu Aisiah. Terkait industri yang sedang berkembang di Jawa timur, Ibu Aisiah mengatakan bahwa:

¹² *Ibid.*

“ Saya setuju aja sih mas, apalagi nanti kan industri ini akan menyerap tenaga kerja dari masyarakat kita, jadi pengangguran juga akan ditekan. Tapi ya harus itu mas, pemerintah harus bisa mengatur bagaimana caranya strategi industri ini berhasil, jadi seminimal mungkin dampak negatifnya dicegah, terutama terkait dengan limbah industri yang selalu merepotkan, seperti yg terjadi di tenggara desa kita. Seperti mas tau juga kan, ini disebelah kiri dan kanan kan ada pabrik karung, itu yang kerja disitu kan diutamakan pemuda desa dulu, jadi biar mereka tidak perlu jauh untuk mencari kerja. Selanjutnya, terkait dengan sektor pertanian ya kita mengharapkan tetap dipantau terus ya, kalau bisa ya dapat subsidi bibit dan obat-obatan, biar dua-duanya bisa jalan”¹³

Dari semua perspektif aktor diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa, semua aktor yang sudah diwawancarai setuju dengan adanya proses industrialisasi, karena mereka menganggap industri akan memberikan keuntungan yang sangat besar, perspektif seperti ini menunjukkan bahwa mereka menjadikan aspek untung sebagai faktor pilihan mereka (Kapitalis). Meskipun sebagian dari mereka tetap mempunyai harapan agar sektor pertanian juga mendapatkan perhatian lebih, sehingga tidak ada yang dirugikan.

Dengan adanya persetujuan dari pemerintah daerah tersebut mengakibatkan industri di Kabupaten Nganjuk terus berkembang dengan pesat, sehingga telah banyak merubah komposisi ruang yang oleh lefebvre disebut dengan proses abstraksi. Proses abstraksi ini terlihat dari banyaknya lahan persawahan yang kemudian beralih fungsi menjadi lahan berdirinya industri. Hal ini tentu harus diantisipasi oleh pemerintah daerah dengan segera menyelesaikan pedoman tata ruang yang baru sehingga proses abstraksi ruang tidak akan merugikan pihak manapun.

¹³ Wawancara Ibu Aisiah, Kantor Desa Jekek, Tanggal 15 Mei 2018

Dalam kaitannya dengan proses industrialisasi, David Harvey menyebutkan bahwa Kabupaten Nganjuk ini merupakan lokasi dimana oleh kaum kapitalisme dijadikan sebagai sirkuit kedua yang berupa tempat untuk pembentukan kapital dan konsumsi tetap yang sengaja diciptakan karena Kabupaten Nganjuk secara langsung telah terhubung dengan kota-kota besar (sirkuit utama/primer) seperti Surabaya dan Sidoarjo yang selama ini menjadi pusat industri dan konsumsi langsung di Jawa timur. apalagi semenjak adanya proyek jalan tol yang tentu akan mempermudah akses masuk maupun keluar Kabupaten Nganjuk. selain itu kriteria lain yang dijadikan pertimbangan oleh para Kapitalis adalah ketersediaan lahan di Kabupaten Nganjuk masih sangat luas, selanjutnya upah minimum Kabupaten (UMK) masih tergolong rendah yaitu dikisaran Rp 1.660.444.69.¹⁴ Realitas yang demikian, menurut Harvey merupakan strategi yang dilakukan oleh golongan kapital agar kebutuhan dasar dari kapitalisme berupa *profit* bisa terus diperoleh sehingga sistem kapitalisme bisa terus berjalan.

f. Perspektif Masyarakat terhadap Industrialisasi di Kabupaten Nganjuk

Dalam menanggapi isu terkait industri yang sedang berkembang di Kabupaten Nganjuk, masyarakat menyatakan setuju, dengan alasan bahwa industri akan mempermudah mereka dalam mencari pekerjaan tanpa perlu malukan urbanisasi ke kota besar seperti misalkan surabaya, seperti yang diungkapkan oleh salah satu warga yaitu bapak Slamet, dimana sebelumnya tanah dari bapak Slamet ini telah dibeli investor untuk pendirian pabrik, ia mengatakan bahwa:

¹⁴ Agus. 2018. *Daftar Gaji Umr Jatim Tahun 2018, Daftar Lengkap Umr 38 Kabupaten Dan Kota Di Jawa Timur Tahun 2018*. Diakses dari <http://www.gajiumr.com/gaji-umr-jawa-timur/>, pada 13/09/2018, pukul 09:22 Wib

“Kalau saya setuju saja ya mas, soalnya kan kalau ada industri jadi makin mudah untuk cari pekerjaan, anak saya kan dulu kerja jauh di surabaya, sekarang sejak ada pabrik PT. Indo Prima yang di Klintar itu kan jadi kerjanya dekat, gak perlu jauh-jauh. Kebetulan kan dulu saya juga pernah menjual sawah saya yang di Lengkong buat industri katanya, ya karena harga jualnya tinggi sekali akhirnya saya lepas”.¹⁵

Saat ditanya lebih lanjut mengenai alasan melepas sawahnya, bapak Slamet menjelaskan bahwa memang tidak ada sosialisasi dari pemerintah terkait perlindungan lahan pertanian, sehingga sebagian dari mereka tidak mengetahui apakah sawah mereka masuk perhitungan sebagai lahan pertanian yang dilindungi atau tidak, sehingga jika ada yang ingin membeli dengan harga tinggi mereka dengan yakin akan melepasnya. Seharusnya dalam rangka mewujudkan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan pihak pemerintah mengajak seluruh masyarakat terutama yang memiliki lahan pertanian untuk sama-sama berkomitmen menjaga lahan pertanian yang ada, selain itu harus ada intensif yang diberikan seperti pemberian subsidi pupuk, alat bantu pertanian dan lain sebagainya, sehingga pengalihfungsian lahan pertanian bisa di minimalisir.

5.3 Analisis Teoritik tentang Kontestasi Tata Ruang Industrialisasi di Kabupaten Nganjuk

Problematika pemanfaatan ruang, khususnya di Kabupaten Nganjuk yang berkaitan dengan dilemma industrialisasi di tingkat lokal, dapat dijelaskan menggunakan teori produksi ruang dari Henri Lefebvre dan teori ekonomi politik ruang dari David Harvey.

¹⁵ Wawancara Bapak Slamet, Baron, Tanggal 15 Mei 2018

a. Analisis Teori Produksi Ruang Henri Lefebvre

Dalam tulisannya tersebut Lefebvre memberikan sebuah analisis mendalam tentang proses pemanfaatan ruang serta beroperasinya kapitalisme modern yang kemudian dikembangkan oleh David Harvey. Dalam karyanya yang berjudul *“The Political of Space”* ia menjelaskan bahwa dalam setiap pemanfaatan ruang terdapat proses kompleks dimana kaum kapitalis selalu berusaha mendominasi kepemilikan atas ruang.

Kabupaten Nganjuk saat ini, secara perlahan terus mengalami perubahan menuju sebuah daerah perindustrian, sehingga banyak praktik spasialisasi ruang yang terjadi. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Henri Lefebvre bahwa dalam setiap pemanfaatan ruang ada sebuah proses spasialisasi ruang, representasi ruang dan ruang representasional yang mana ketiganya saling berkaitan.¹⁶ Proses spasialisasi ruang di Kabupaten Nganjuk berawal dari masuknya para investor dari luar Kabupaten Nganjuk yang mendirikan perusahaannya diatas lahan pertanian, hal ini mengakibatkan ruang (sawah) yang selama ini dimiliki oleh masyarakat lokal khususnya para petani menjadi diambil alih oleh para investor pendatang, baik itu dengan cara membeli maupun menyewa. Daya beli tanah yang lebih tinggi menjadi salah satu faktor yang membuat masyarakat merelakan tanah mereka untuk diambil alih oleh para investor. Akibat dari adanya proses spasialisasi ruang tersebut masyarakat mengalami pergeseran dari 3 hal yaitu ruang, ekonomi dan kemampuan.

Pergeseran dalam hal ruang terjadi karena masyarakat telah mengalihkan kepemilikan sawah mereka untuk diambil alih oleh para investor sehingga para investor akan mendominasi pemanfaatan ruang (sawah) tersebut. Selanjutnya, pergeseran ekonomi terjadi ketika banyak dari para petani yang sawahnya telah dibeli kemudian beralih profesi menjadi pegawai pabrik, pedagang dsb. Jika hal ini terus berlanjut maka akan terjadi pergeseran kemampuan dimana pemerintah akan lebih mengutamakan sektor industri daripada sektor pertanian karena dianggap lebih mampu memberikan kontribusi lebih terhadap pemasukan keuangan daerah.

Kedatangan para investor ke Kabupaten Nganjuk menjadikan ruang representasi mengalami perubahan. Ruang (sawah) yang dulunya merupakan ruang representasi masyarakat Kabupaten Nganjuk sebagai lahan untuk bertani sekarang telah berubah menjadi pabrik-pabrik yang diciptakan oleh para investor sebagai golongan pendatang. Selanjutnya, secara berkala nantinya Kabupaten Nganjuk juga akan mengalami perubahan dalam hal representasi ruang, dimana Kabupaten Nganjuk yang dikenal sebagai daerah pertanian yang sangat subur secara perlahan eksistensi sektor pertanian akan mengalami penurunan dan digantikan oleh industri, dan bukan tidak mungkin Kabupaten Nganjuk akan berubah menjadi sebuah daerah industri.

b. Analisis Teori Ekonomi Politik ruang David Harvey

Pemikiran David Harvey sedikit berbeda dengan yang disampaikan oleh Lefebvre sebelumnya, meskipun keduanya sama-sama memandang produksi ruang sangat penting bagi keberlangsungan kapitalisme, Harvey tidak memprioritaskan

perkotaan sebagai kebutuhan modal industri.¹⁷ yang menjadi penting adalah bagaimana sebisa mungkin meminimalisir biaya produksi, namun bisa memaksimalkan kebutuhan akan tenaga kerja, akses ke pasar dan bahan baku sehingga dalam hal ini golongan kapitalis akan mencari daerah yang secara langsung terhubung dengan pusat kota untuk dijadikan ruang baru.¹⁸

Melihat pernyataan diatas sangat jelas bahwa dalam hal ini Kabupaten Nganjuk dijadikan ruang baru oleh kaum kapitalisme (investor) sebagai sirkuit kedua yang bertindak sebagai ranah pembentukan kapital dan konsumsi tetap yang sengaja diciptakan karena Kabupaten Nganjuk secara langsung telah terhubung dengan kota-kota besar (sirkuit utama/primer) seperti Surabaya dan Sidoarjo yang selama ini menjadi pusat industri dan konsumsi langsung di Jawa timur. apalagi semenjak adanya proyek jalan tol yang tentu akan mempermudah akses masuk maupun keluar Kabupaten Nganjuk. selain itu kriteria lain yang dijadikan pertimbangan oleh para Kapitalis adalah ketersediaan lahan di Kabupaten Nganjuk masih sangat luas, selanjutnya upah minimum Kabupaten (UMK) masih tergolong rendah yaitu dikisaran Rp 1.660.444.69.¹⁹ Realitas yang demikian, menurut Harvey merupakan strategi yang dilakukan oleh golongan kapital agar kebutuhan dasar dari kapitalisme berupa *profit* bisa terus diperoleh sehingga sistem kapitalisme bisa terus berjalan.

¹⁷ Andrzej Zieleniec. *Op.cit.*, hlm.102

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Agus. 2018. *Daftar Gaji Umr Jatim Tahun 2018, Daftar Lengkap Umr 38 Kabupaten Dan Kota Di Jawa Timur Tahun 2018*. Diakses dari <http://www.gajiumr.com/gaji-umr-jawa-timur/>, pada 13/09/2018, pukul 09:22 Wib

5.4 Relasi Antar Aktor dalam Proses Industrialisasi di Kabupaten Nganjuk

Proses industrialisasi sedikit banyak telah merubah kondisi penataan ruang yang ada di Kabupaten Nganjuk. Terdapat banyak aktor yang terlibat dalam prosedur industrialisasi. untuk mengetahui relasi yang terjalin antar aktor, maka peneliti melakukan wawancara dengan berbagai informan. Pertama, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Nganjuk. Dalam kaitannya dengan industrialisasi, pihaknya tidak ada wewenang untuk masalah perndirian industri besar, pihaknya hanya menangani hal yang berkaitan dengan industri menengah kecil (IMK) berikut adalah hasil wawancara dengan Kepala bidang perencanaan Disperindag Kabupaten Nganjuk, yaitu Bapak Heni:

“Untuk industri yang masuk ke Nganjuk ini kan bukan wewenang kita untuk memberikan izin, Itu kan wewenang dari DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu). Saya sendiri masuk kesini kan baru mulai tahun 2017 jadi untuk detail memang ga begitu tau pastinya. Soalnya kami memang dinas industri ya tapi pihak kita cuma ada masalah tentang IMK (Industri Mengengah Kecil) saja, tapi untuk industri atau pabrik besar itu kami tidak ada datanya, yang ada itu justru di DPMPTSP atau gak di Bappeda. Soalnya kalo biasanya ada perusahaan mau berdiri tuh kita Cuma dikasih tau saja, ditempat A ini loh mau dibuat pabrik, tapi kita memang tidak ada wewenang buat itu semua.”²⁰

Selanjutnya, Dinas Pertanian Sebagai perangkat daerah yang seharusnya memperjuangkan sektor pertanian, secara mengejutkan memberikan persetujuan dengan adanya industrialisasi yang memakan lahan pertanian produktif di Kabupaten Nganjuk. Namun, dalam prosedur perizinan pendirian indusutri, pihaknya sama sekali tidak mempunyai wewenang dalam pengambilan keputusan,

²⁰ Wawancara dengan Bapak Heni. *Opcit.*

pihaknya hanya diikutsertakan dalam rapat dan hanya sebatas mengetahui bahwa lahan pertanian di suatu daerah akan dibangun industri. berikut adalah wawancara dengan Bapak Agus selaku Kepala bidang perencanaan di Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk:

“Untuk masalah industrialisasi dari pihak kami tidak mempunyai wewenang apapun terkait itu, pihak kami hanya sekedar diundang rapat, ya hanya sekedar tahu saja, kalau lokasi A misalnya mau di buat industri, kami nanti melihat apakah saluran irigasinya bagus, cocok atau gaknya ya tergantung Bappeda dan Pihak DPPTSP. Soalnya sana yang mengurus.”²¹

Kemudian, informan selanjutnya adalah Bapak Muji selaku Kepala bidang perencanaan dan Perekonomian di Bappeda Kabupaten Nganjuk, yang mengatakan bahwa :

“Jadi gini, izin pemanfaatan ruang itu ada empat kalau gak salah, yaitu izin prinsip, izin lokasi, izin penggunaan pemanfaatan tanah, dan izin pendirian bangunan, ini, diaturan intinya ini. Lah, kalo prosedur di kita, pertama rekomendasi, rekomendasi pemanfaatan ruang, ini yang mengeluarkan Sekda. Nanti Sekda memberikan konfirmasi bahwa lahan ini bisa dipakai untuk ini, ini, ini. Nanti setelah ini, kalo diatas satu hektar perlu melakukan sebuah izin lokasi. Ini yang mengeluarkan Bupati, izin lokasi itu izin untuk menguasai tanah. Nah, ini nantikan rekom nya macem-macem, ini prosedurnya lewat BPN (Badan Pertanahan Nasional), dari mungkin yang semula sawah, permukiman dll, sekarang berubah menjadi pabrik kan jadi hak guna bangunan. Lah, nanti disamoing ini klao sesuai besarnya, harus izin lingkungannya harus ke UKLPL, kalo industrinya besar harus ke AMDAL, kalo bisa berpotensi banjir bisa ke ANDALALIN. Nanti semua sudah, ini terakhirnya izin bahan bangunan, baru setelah itu bisa dibangun. Namun prakteknya itu enggak, banyak yang ambil jalan pintas, baru pada tahap pertama langsung loncat ke tahap terakhir. Tapi ini biasanya bagi yang punya uang. Hahahahahhaaaaa..... tapi itu semua masih sebagian, saya juga kurang tau detailnya, itu semua ada di perizinan. Kadang kan emang pabrik besar itu harus ke Provinsi dulu”.²²

²¹ Wawancara dengan Bapak Agus. *Opcit.*

²² Wawancara dengan Bapak Muji. *Opcit.*

Informan selanjutnya adalah Bappeprov Jawa timur, terkait dengan Perindustrian di Kabupaten Nganjuk, pihak Bappeprov menyerahkan prosedur perizinan Industri sepenuhnya ke daerah, berikut adalah petikan wawancara dengan Ibu Karimah, selaku Kepala Bidang Perekonomian:

“Mekanisme untuk lebih detail tanya ke Kabupaten ya, soalnya kalau wewenang pemerintah Provinsi itu hanya sebatas pemberian IPR (Izin Pemanfaatan Ruang), misalnya mau ada industri berdiri di kawasan mana, lah ini izin pemanfaatan ruangnya di Provinsi. Misalnya ada investor butuh lahan 25 hektar di Kabupaten Nganjuk, dia izin itu ntar di daerah Kertosono gitu, dia meminta izin ke Pemprov, kemudian Pemprov akan melihat apakah Kertosono di RTRW boleh gak untuk industri, kalau misal boleh kita akan menurunkan surat izinnya, tapi untuk detail Kertosono sebelah mananya itu wewenang daerah. IPR ini berlakunya 3 tahun, kalau misalnya dalam kurun waktu tersebut tidak kunjung berdiri makan pihak investor harus melakukan prosedur dari awal lagi”.²³

Informan terakhir adalah Kepala desa Jekek yaitu Ibu Aisiah yang sekaligus mewakili masyarakat Kabupaten Nganjuk, beliau mengatakan bahwa ,masyarakat sama sekali tidak memiliki wewenang apapun terkait Industrialisasi yang sedang Berkembang di Kabupaten Nganjuk. adapun petikan wawancaranya adalah sebagai berikut:

“ ya kalo kita sebagai masyarakat sama sekali tidak mempunyai wewenang, ya tiba-tiba ada industri gitu aja, pokoknya kita tinggal terima jadi gitu aja. Paling ya perangkat desa dikasih tau kalo mau dibangun industri”.²⁴

Dari wawancara dengan berbagai informan diatas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Provinsi hanya sebatas memberikan izin pemanfaatan ruang kepada industri besar, selanjutnya untuk masalah perizinan dan lain sebagainya sepenuhnya

²³ Wawancara dengan Ibu Karimah. *Opcit.*

²⁴ Wawancara dengan Ibu Aisiah. *Opcit.*

diserahkan ke pihak Pemerintah daerah. Pihak yang mempunyai wewenang dalam perizinan dan pendirian industri menengah besar antara lain Bappeda, Dinas Perizinan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPPTSP), Sedangkan untuk Disperindag dan Dinas Pertanian hanya diikut sertakan dalam rapat, namun mereka tidak memiliki wewenang terkait perizinan tersebut.



BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari analisis politik tata ruang wilayah kabupaten nganjuk yaitu berkaitan dengan dilemma industrialisasi ditingkat lokal, Penulis menyimpulkan beberapa hal, yaitu:

1. Baik pemerintah maupun masyarakat menyatakan setuju dengan adanya industrialisasi di Kabupaten Nganjuk.
2. Terdapat perubahan pemanfaatan ruang di Kabupaten Nganjuk yang oleh Lefebvre dikategorisasikan kedalam triad spatial yaitu Spasialisasi ruang, representasi ruang dan ruang representasional. selain itu industrialisasi yang sedang berkembang di Kabupaten Nganjuk menurut Harvey merupakan sirkuit kedua (sekunder) oleh golongan kapital yang dijadikan sebagai ranah pembentukan kapital dan konsumsi tetap.
3. Relasi yang terjadi antar aktor kurang berjalan dengan baik, karena didominasi oleh Bappeda Kabupaten Nganjuk dan Dinas Perizinan, sedangkan dinas terkait lainnya sama sekali tidak memiliki wewenang dalam proses perizinan pendirian industri.

6.2 Saran

1. Dari hasil penelitian ini, peneliti mengharapkan lebih banyak akademisi, peneliti, dan masyarakat yang mengkaji tentang produksi ruang, khususnya dalam bidang ilmu politik demi pengembangan keilmuan.
2. Pemerintah daerah harus segera menyelesaikan review RTRW yang sampai saat ini belum selesai, sehingga pedoman dalam pemanfaatan ruang masih berpatok pada RTRW Kabupaten Nganjuk 2010-2030. Sedangkan secara fakta empirik sudah terjadi banyak perubahan dalam pemanfaatan ruang yang ada. Selain itu Pemerintah harus bertindak sebagai pihak yang netral, guna menjembatani antara masyarakat dan golongan kapital.
3. Untuk masyarakat Kabupaten Nganjuk diharapkan turut serta berperan aktif dalam menjaga konversi lahan, sehingga ketersediaan lahan akan terus terjaga khususnya lahan pertanian. Jangan mudah melepaskan lahan dengan tawaran harga yang lebih tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adisasmita, Raharjo. 2014. *Ekonomi Tata Ruang Wilayah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Agusta I. 2001. *Modul kuliah sosiologi industri*. Bogor: IPB.
- Fearon ,David. 2002. Alfred Weber, *Theory of the Location of Industrie*. UC Santa Barbara: CSISS Classics.
- Hakim, M. Lukman. 2011. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Krijanto, Rahmat. 2006. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana.
- Marsh,David, Gerry Stoker. 2012. *Teori dan Metode dalam Ilmu Politik*. Nusa Media.
- Raharjo M. Dawam. 1986. *Transformasi Pertanian, Industrialisasi*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukardi. 2009. *Metodologi Penelitian Pendidikan. Kompetensi dan Prakteknya*, Yogyakarta: PT Bumi Aksara.
- Tambunan, Tulus T.H. 2003. *Perkembangan Sektor Pertanian di Indonesia, Beberapa Isu Penting*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Zieleniec, Andrzej. 2007. *Space and Social Theory*. London: Sage Publication.

Jurnal Ilmiah:

- Aminah, Siti, 2015, *Konflik dan Kontestasi Penataan Ruang Kota Surabaya*, Masyarakat: Jurnal Sosiologi, 20 (1).
- Bosquet, Gregory. 2012. Political Space in the Work of Henri Lefebvre: Ideology and Utopia. Volume 5. Université Paris Ouest Nanterre.
- Elden, Stuart. 2007. There is a Politics of Space because Space is Political Henri Lefebvre and the Production of Space. Volume 10. Number 2.
- Lazarwadi, Kosa, 2012, *Ruang yang Tercipta oleh Para Pesepeda (Studi Kasus: Bundaran Hotel Indonesia pada acara Car Free Day)*, Depok: Unioversitas Indonesia.

Mahardhika, Reza. 2016. *Motif Politik Ekonomi dalam Rencana Pengembangan Kawasan Industri Sidayu*. Pusat Kajian FISIP UNAIR.

Mustofa, Zaenal. 2011. *Analisis faktor yang memepengaruhi alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Demak*. Skripsi. UNDIP Semarang.

Prihatin, Rohani Budi. 2015. *Alih Fungsi Lahan di Perkotaan (Studi Kasus: di Bandung dan Yogyakarta)*. Jakarta: P3DI.

Soemarno. 2013. *Konversi lahan*. PPSUB.

Dokumen:

Badan Pusat Statistika Kabupaten Nganjuk. *PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Nganjuk 2012-216 Tahun Dasar 2010*.

Bappeda. 2017. *Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Nganjuk 2016*. Nganjuk.

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Nganjuk. 2018. Data Perusahaan di Kabupaten Nganjuk.Nganjuk.

Dinas Pertanian. Penetapan dan Penyusunan Draft LP2BKabupaten Nganjuk – Laporan Akhir/2015. hlm. VI-13

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk. Bappeda. Nganjuk. 2011.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Website:

Agus. 2018. *Daftar Gaji Umr Jatim Tahun 2018, Daftar Lengkap Umk 38 Kabupaten Dan Kota Di Jawa Timur Tahun 2018*. Diakses dari <http://www.gajiumr.com/gaji-umr-jawa-timur/>, pada 13/09/2018, pukul 09:22 Wib

Akuntono indra. 2015. *Gubernur Jatim Tetapkan UMK 2016*. Surabaya: Kompas.com, Diakses dari <http://regional.kompas.com/read/2015/11/21/05000061/Gubernur.Jatim.Tetapkan UMK.2016>. pada 10/12/2017, pukul 19:07 Wib

Nurohmah, Eva. 2016. *Lengkong Sasaran Industri*. Kertosono, Diakses dari <https://kertosono.net/lengkong-sasaran-industri/> , pada 05 Maret 2018. Pukul 18:21 Wib.

Pamungkas, Arie Setyaningrum,2016, *Produksi Ruang dan Revolusi Kaum Urban Menurut Henri Lefebvre*: LKIP. Diakses pada 06 Februari 2018 dari <https://indoprogress.com>

Penataanruang.com, diakses pada 04 Maret 2017